



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 91 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINANGGEEA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINANGGEA KABUPATEN KONAWA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah yang diberikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya diangkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerja.

BAB II

RENSTRA PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEEA

Pasal 2

- (1) UPTD Puskesmas Tinanggea menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026.
- (2) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Renstra disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran Pelayanan Puskesmas;
 - c. permasalahan dan Isu Strategis Puskesmas;
 - d. visi, Misi, Tujuan, dan Arah Kebijakan;
 - e. rencana Strategis;
 - f. penutup.
- (4) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan serta berpedoman pada RPJMD bersifat indikatif.
- (5) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEEA

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas Tinanggea yang akan menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA
BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEEA

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea, mencakup indikator kinerja UPTD Puskesmas Tinanggea serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, Misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD Puskesmas dan telah dilaksanakan melalui Renja UPTD Puskesmas Tinanggea.

Pasal 6

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala UPTD Puskesmas Tinanggea melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas Tinanggea melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas menjadi pedoman bagi Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea dalam penyusunan Renja.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan melakukan sinkronisasi antara Renja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	↓
2. ASISTEM I	↓
3. KADIS KESEHATAN	↓
4. KABAG HUKUM	↓
5.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 05 SEPTEMBER 2022

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 05 SEPTEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



Hj. ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 91

LAMPIRAN PERATURAN BUPATIKONAWA SELATAN

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PENERAPAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINANGGEA KABUPATEN KONAWA SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Penyusunan rencana strategis Puskesmas dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis Puskesmas memuat antara lain:

- Rencana pengembangan layanan
- Strategi dan arah kebijakan
- Rencana program dan kegiatan
- Rencana keuangan

Rencana Strategis BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Rencana Strategis BLUD Puskesmas tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah:

Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya-Puskesmas untuk pencapaian visi dan misi Organisasi.

Sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.

Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis Puskesmas adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
9. Peraturan Kepala Daerah tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan.
10. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Puskesmas Pembantu Menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.

13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.
14. Praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.

E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sitematika penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut:

Kata Pengantar

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS

- A. Gambaran Umum Puskesmas
- B. Gambaran Organisasi Puskesmas
- C. Kinerja Pelayanan Puskesmas

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS

- A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat
- B. Isu Strategis
- C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi Puskesmas
- B. Misi Puskesmas
- C. Tujuan (Rencanan Pengembangan Layanan)

D. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)

E. Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KERANGKA PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS

A. GAMBARAN UMUM PUSKESMAS

1. Wilayah Kerja

UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan satu-satunya Puskesmas induk di Kecamatan Tinanggea dan UPTD Puskesmas Tinanggea berada di wilayah Kelurahan Ngapaaha

UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan Salah satu dari puskesmas Rawat Inap di wilayah kecamatan Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di sebelah Selatan pusat kota yang berjarak 9 KM dengan jarak tempuh ± 45 menit menggunakan kendaraan roda empat. UPTD Puskesmas Tinanggea berada di Kelurahan Ngapaaha wilayah Kecamatan Tinanggea. Keadaan geografisnya adalah dataran rendah/daerah Pesisir dan sebagian berbukit siklus pergantian musim hujan dan musim kemarau rata-rata 6 (enam) bulan. Curah hujan tertinggi rata-rata pada bulan September sampai dengan Januari. Suhu udara berada pada 24° - 28° C.

UPTD Puskesmas Tinanggea awalnya dibangun sesuai standar Puskesmas non perawatan satu lantai pada tahun 1970 yang kemudian mengalami renovasi menjadi lantai satu Rawat Inap 1992, selanjutnya pada tahun 2015 UPTD Puskesmas Tinanggea telah melaksanakan pelayanan PONED. direnovasi Gedung menjadi lantai dua pada tahun 2019 yang difungsikan untuk pelayanan UGD dan Rawat Inap. Selanjutnya pada tahun 2020 dibangun Gedung baru lantai dua yang difungsikan untuk pelayanan unit rawat jalan dan administrasi.

UPTD Puskesmas Tinanggea ditetapkan menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 1992 yang ditandai dengan peresmian oleh Kepala wilayah Kecamatan Tinanggea dan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendari. Selanjutnya pada tahun 2015 Puskesmas di tetapkan menjadi Puskesmas perawatan dan Puskesmas mampu

menyelenggarakan PONEB Oleh Kepala Dinas Kabupaten Konawe Selatan.

Secara geografis wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinanggea berada di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan terletak di daerah pedesaan Pesisir Pantai dengan batas wilayah sebagai berikut.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Kecamatan Lalembu
- Sebelah Timur : Berbatasan Kecamatan Palangga Selatan
- Sebelah Barat : Berbatasan Kabupaten Bombana
- Sebelah Selatan : Berbatasan Laut Tiworo

UPTD Puskesmas Tinanggea secara administratif mempunyai wilayah kerja terdiri dari 22 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Desa Akuni | 13. Desa Moolo Indah |
| 2. Desa Asingi | 14. Kel. Ngapaaha |
| 3. Desa Bomba-Bomba | 15. Desa Palotawo |
| 4. Desa Bungin Permai | 16. Desa Panggoosi |
| 5. Desa lalonggasu | 17. Desa Roraya |
| 6. Desa Lalowatu | 18. Desa Tatangge |
| 7. Desa Laonowulu | 19. Desa Tolutu Jaya |
| 8. Desa Lapoa | 20. Kel. Tinanggea |
| 9. Desa Lapulu | 21. Desa Torokeku |
| 10. Desa Lasuai | 22. Desa Wadonggo |
| 11. Desa Matambawi | 23. Desa Watumelewe |
| 12. Desa Matandahi | 24. Desa Wundumbolo |

Jarak tempuh dari Puskesmas ke Desa/Kelurahan terdekat dan terjauh
: ± 0 – 15 Km. Jarak Puskesmas ke Kabupaten/Kota : 20 km

Dari jumlah Desa tersebut seluruhnya masuk kategori desa swadaya yang terbagi menjadi 4 Dusun, dengan jarak desa terjauh 10 Km dari pusat kecamatan yang berjarak tempuh 15 menit menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tinanggea di Kecamatan Tinanggea. Kecamatan Tinanggea terletak di wilayah Barat Daya Kabupaten Konawe Selatan dengan jarak ± 20 km dari pusat kota Konawe Selatan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Berdasarkan karakteristik wilayah, UPTD Puskesmas Tinanggea merupakan Puskesmas kawasan Perdesaan, sedangkan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan termasuk dalam kategori Puskesmas Rawat Inap dengan Fasilitas PONED.

UPTD Puskesmas Tinanggea sesuai dengan Permenkes RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

UPTD Puskesmas Tinanggea berlokasi di Jl. Poros Tinanggea-Bombana Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Email : *puskemastinanggea2021@gmail.com* Kode Pos 93385, dengan wilayah kerja sebanyak 22 Desa dan 2 Kelurahan di wilayah Kecamatan Tinanggea UPTD Puskesmas Tinanggea didukung jejaring dibawahnya sebanyak 2 Unit Puskemas pembantu (Pustu), 2 Unit Poskesdes dan 29 Posyandu Balita serta 22 Posyandu Lansia dan PTM (Posbindu) ditambah jaringan dokter praktek dan lain-lain.

Posisi tersebut merupakan suatu kemudahan bagi Puskesmas Tinanggea dalam hal melakukan upaya pelayanan rujukan ke Fasilitas

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang lebih tinggi. Puskesmas Tinanggea yang berada di jalur jalan Provinsi lokasi yang strategis memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

Wilayah kerja Puskesmas merupakan kawasan perdesaan dengan jumlah penduduk yang relative padat. Hal tersebut karena banyak pembangunan perumahan yang hingga saat ini masih terus berkembang terutama di wilayah Kelurahan Tinanggea.

Selain padatnya pemukiman di wilayah kerja Puskesmas Tinanggea, Pada tahun 2017 UPTD Puskesmas Tinanggea meraih sertifikat Akreditasi Puskesmas dengan Kategori Dasar.

2. Pelayanan Puskesmas

Upaya kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab UPTD Puskesmas Tinanggea meliputi :

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas
 - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 3) Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - a) Pelaksana Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Balita
 - b) Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang
 - c) Pelaksana Keluarga Berencana
 - d) Pelaksana Kesehatan Reproduksi Catin
 - e) PKPR
 - f) Pengelola kanker serviks
 - g) Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 4) Pelayanan Gizi
 - 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - a. Posbindu PTM
 - b. Pelayanan Terpadu PTM
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indra
 - d. Pelayanan Kesehatan Jiwa

- b) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - a. Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
 - b. Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dengue/DBD
 - d. Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis (Malaria, Rabies)
 - e. Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS
 - f. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual
 - g. Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
 - h. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yang Dapat di Cegah Dengan Imunisasi (Hepatitis)
 - i. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis (Kusta)
 - j. Pencegahan dan Pengendalian ISPA
 - k. Pencegahan dan Pengendalian Diare
 - l. Surveilans.
 - m. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - 1) Kesehatan Gigi Masyarakat
 - 2) Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 - 3) Kesehatan Tradisional

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Tinanggea meliputi:

- a. Rawat Jalan:
 - 1) Pemeriksaan Umum
 - 2) Pemeriksaan Gigi
 - 3) Pemeriksaan Anak/MTBS
 - 4) Pemeriksaan KIA/KB
 - 5) Pelayanan Imunisasi
 - 6) Pelayanan Konseling Terpadu
 - 7) Pelayanan Obat
 - 8) Pelayanan Laboratorium
 - 9) Pelayanan informasi dan Pengaduan
- b. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
- c. Pelayanan Obstetri Neonatal dan emergensi dasar (PONED)

d. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap selain itu jika diperlukan, UPTD Puskesmas Tinanggea juga melaksanakan pelayanan rujukan rawat jalan dan rujukan Gawat Darurat.

UKM dan UKP yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tinanggea telah dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja. Beberapa Inovasi UKM yang telah dikembangkan antara lain :

- Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- PMT-Posyandu

Sedangkan pada pelayanan kesehatan perseorangan, terdapat pelayanan kesehatan dasar non rawat inap seperti pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi, serta beraneka ragam layanan yang ditawarkan kepada pelanggan Puskesmas antara lain:

- Layanan kesehatan anak (MTBS)
- Layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui inovasi skrining kewaspadaan terhadap Pre Eklampsia
- Layanan kesehatan penyakit menular Tuberkulosis dan Kusta dengan mengakomodasi pelayanan terhadap pasien TB-MDR
- Layanan kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pelaksanaan pemeriksaan HIV
- Layanan Klinik Sanitasi yang melayani konsultasi penanganan penyakit berbasis lingkungan
- Layanan konsultasi gizi dan konseling ASI untuk tatalaksana gizi pada balita, ibu hamil, ibu menyusui, gangguan metabolik, dan lanjut usia

UPTD Puskesmas Tinanggea juga melakukan pelayanan gawat darurat 24 jam, rawat inap tingkat pertama dan Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED).

Selain itu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Tinanggea juga ditunjang dengan kelengkapan pelayanan penunjang seperti Laboratorium Sederhana dan Farmasi.

B. GAMBARAN ORGANISASI PUSKESMAS

1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi UPTD Puskesmas Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Puskesmas
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas sebagai Koordinator tim Manajemen Puskesmas, dalam pengelolaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan, serta Sistem Informasi Puskesmas yang terdiri dari:
 - 1) Pelaksana Keuangan
 - a) Pelaksana Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi JKN FKTP
 - b) Pelaksana Bendahara Penerimaan Retribusi
 - c) Pelaksana Bendahara BOK
 - 2) Pelaksana Umum dan Kepegawaian
 - a) Pelaksana sarana Prasarana Lingkungan / Bangunan
 - b) Pelaksana Pengelolaan Barang
 - c) Pelaksana Sarana Prasarana Kendaraan
 - d) Pelaksana Administrasi dan Kepegawaian
 - 3) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan
 - 4) Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)
- c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
 - 1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) yang membawahi:
 - a) Koordinator pelayanan promosi kesehatan

- b) Koordinator pelayanan kesehatan lingkungan
 - c) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
 - Pelaksana Kesehatan Ibu dan Balita
 - Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang
 - Pelaksana Keluarga Berencana
 - Upaya Kesehatan Sekolah
 - Pelayanan Kesehatan Lansia
 - Kelas Ibu Hamil
 - d) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKM
 - e) Koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
 - 1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 1. Posbindu PTM
 - 2. Pelayanan Terpadu PTM
 - 3. Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indra
 - 4. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 1. Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
 - 2. Pencegahan dan Pengendalian Kecacangan
 - 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dengue/DBD
 - 4. Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis (Malaria, Rabies
 - 5. Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS
 - 6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual
 - 7. Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
 - 8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yang Dapat di Cegah Dengan Imunisasi (Hepatitis)
 - 9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis (Kusta
 - 10. Pencegahan dan Pengendalian ISPA
 - 11. Pencegahan dan Pengendalian Diare
 - 12. Surveilans.
 - f) Koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 2) Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:

- a) Koordinator pelayanan kesehatan gigi masyarakat
 - b) Koordinator pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - c) Koordinator pelayanan kesehatan kerja dan olah raga
- d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium, antara lain:
- 1) Koordinator pelayanan pemeriksaan umum
 - 2) Koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - 3) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
 - 4) Koordinator pelayanan gawat darurat
 - 5) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - 6) Koordinator pelayanan persalinan
 - 7) Koordinator pelayanan kefarmasian
 - 8) Koordinator pelayanan laboratorium
- e. Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
- 1) Puskesmas Pembantu
 - a) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Lalonggasu
 - b) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Moolo Indah
 - 2) Puskesmas Keliling
 - 3) Jejaring Puskesmas
 - a) Praktik dokter mandiri
 - b) Praktik Bidan Mandiri
 - c) Apotek
- f. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
- 1) Koordinator Peralatan
 - 2) Koordinator APAR
- g. Penanggungjawab Mutu

Uraian Tugas masing masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi seperti diuraikan diatas adalah sebagai berikut (dapat mengacu ke peraturan Bupati/Walikota tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan):

- a) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana dan program kerja UPTD Puskesmas;

- Melaksanakan tugas jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
 - Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Puskesmas;
 - Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Memberikan pembinaan teknis kepada Jaringan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas;
 - Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - Menyusun dan menyiapkan Anggaran UPTD;
 - Melaksanakan kegiatan pencegahan, pengamatan dan pengendalian Penyakit;
 - Melaksanakan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi dan Usaha Kesehatan, Usia Lanjut;
 - Melaksanakan pengawasan kualitas air dan lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman, penyehatan tempat-tempat umum dan penyehatan makanan/minuman;
 - Melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis usaha penyuluhan kesehatan masyarakat, sarana kesehatan dan metode serta penyebarluasan informasi kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan, rawat inap termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, usaha kesehatan mata, kesehatan jiwa, serta kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, pengelolaan obat-obatan dan alat laboratorium;
 - Melaksanakan kegiatan rawat inap bagi Puskesmas yang memiliki tempat perawatan;
 - Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan program kerja UPTD;

- Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 - Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 - Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 - Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPTD;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya
- c) Penanggung Jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)
- Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPTD Puskesmas
 - Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKM.
 - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM
 - Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas
- d) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
- Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPTD Puskesmas
 - Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKM.

- Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM
 - Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas
- e) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
- Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPTD Puskesmas
 - Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKP.
 - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKP
 - Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- f) Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
- Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan
 - Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan.
 - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di Jejaring Pelayanan Kesehatan
 - Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- g) Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
- Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Puskesmas Tinanggea baik yang berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BBI) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.
 - Bersama tim Melakukan pemantauan dan monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.
 - Melakukan monitoring dan update persediaan barang inventaris dan mencatatnya ke dalam kartu persediaan.
 - Membuat Laporan Barang pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (Lima) tahunan yang berada di Puskesmas

Tinanggea untuk diserahkan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

h) Penanggungjawab Mutu

- Menyusun rencana kerja upaya peningkatan mutu puskesmas
- Menyiapkan instrument mutu puskesmas
- Pelaksanaan self assesment maupun audit internal
- Analisis hasil self assesment maupun audit internal
- Pendokumentasian hasil self assesment maupun audit internal
- Menyimpan dokumen mutu pelayanan puskesmas
- Merevisi terhadap dokumen mutu puskesmas
- Memberikan saran perbaikan kepada pelaksana mutu pelayanan dan dituangkan dalam revisi
- Memberikan respon dari saran atau pengaduan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan/klien
- Mempublikasikan sasaran mutu tertentu dan hasil pencapaiannya setiap bulan pada papan informasi dalam gedung Puskesmas kepada pengunjung/pelanggan/klien.
- Melaporkan pertanggungjawabannya kepada pimpinan manajemen mutu.

i) Pelaksanaan Perencanaan dan pelaporan

- Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan, dan hasil kegiatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan UPTD Puskesmas/Perencanaan Tingkat Puskesmas.
- Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan perencanaan dan pelaporan.
- Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan
- Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas
- Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan
- Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas

j) Pelaksana Keuangan

- Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan keuangan

- Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan pengelolaan keuangan
 - Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan
 - Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan
 - Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan
 - Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas
- k) Pelaksana Umum Kepegawaian
- Menyiapkan bahan, dokumen, dan kebijakan, perencanaan kepegawaian sarana prasarana dan administrasi umum
 - Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
 - Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawain, sarana prasaran dan administrasi umum.
 - Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
 - Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
 - Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
 - Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
 - Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas.
- l) Koordinator Program UKM
- Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan UKM
 - Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja UKM
 - Menyusun perencanaan kegiatan UKM, Rencana Usulan kegiatan, Rencana Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan UKM
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan
 - Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan dan membuat rencana tindak lanjut
 - Melaksanakan rencana tindak lanjut

m) Koordinator Pelayanan UKP

- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan diruang pelayanan
- Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan, dokumen, dan kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan.
- Bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman dan prosedur kerja setiap jenis pelayanan.
- Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan bahan kerja
- Melaksanakan pemenuhan indicator mutu, kinerja dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan.

n) Pelaksana Pelayanan UKP

- Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan
- Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab pelayanan dan membuat rencana tindak lanjut.

o) Penanggung Jawab Pustu dan poskesdes

- Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan, dokumen, kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan di Pustu dan Poskesdes
- Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja
- Menyusun perencanaan kegiatan, rencana usulan kegiatan, Rencana Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
- Melaksanakan Kegiatan yang sudah direncanakan
- Melakukan evaluasi hasil kegiatan
- Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas

p) Pelaksana Pelayanan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling

- Menyiapkan bahan, dan alat kerja kegiatan
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan prosedur kerja yang berlaku
- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan

- Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab
- Membuat rencana tindak lanjut.

2. Sumber Daya Puskesmas

a. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia di UPTD Puskesmas Tinanggea meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. UPTD Puskesmas Tinanggea sudah memenuhi tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Ahli Teknologi Laboratorium Medis, Bidan dan Nutrisi, Pranata Laboratorium, tenaga Bendahara, Pengelola Barang Milik Daerah dan Akuntan. Berikut ini profil ketenagaan di UPTD Puskesmas Tinanggea :

Tabel 2.1 Profil Ketenagaan di UPTD Puskesmas Tinanggea

Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1	Dokter	2	TKD	2	0	0
2	Dokter gigi	1	PNS	1	1	0
3	Apoteker	1	Tenaga Kontrak BOK	2	2	-1
4	Asisten Apoteker	2	PNS, Sukarela	2	2	-1
5	Administrasi Kepegawaian	4	PNS	3	3	+1
6	Bendahara	4	PNS	5	4	-1
7	Pengadministrasian Umum	1	Sukarela	1	1	-1
8	Sistem Informasi Kesehatan	1	PNS	1	1	0
9	Pengelola Barang Aset Negara	1	PNS	1	1	0
10	Pengelola Program dan Pelaporan	1	PNS	1	1	0
11	Kasir	1	PNS	1	1	0
12	Perekam Medis	2	PNS	2	2	0
13	Kebersihan	2	Honorir	2	2	0
14	Sopir Ambulan	1	Sukarela	2	2	0
15	Penjaga keamanan	-	-	-	-	-
16	Perawat					
17	Perawat desa	22	NS dan Sukarela	1	1	0
18	(pusbu/poskesdes)	-	-	-	-	-
19	Perawat gigi	1	Sukarela	1	1	0
20	Bidan					
21	Bidan pusbu/kesdes	22	NS dan Sukarela	1	1	0
22	Tenaga Gizi	5	NS dan Sukarela	4	4	+1
23	Ahli Tenaga Laboratorium Medis	1	tenaga Kontrak B	2	2	-1
24	Sanitarian/ Tenaga kesehatan lingkungan	1	PNS	1	1	0
25	Tenaga kesehatan masyarakat	-	-	-	-	-
26	Epidemiologi Kesehatan	-	-	-	-	-
	JUMLAH					

b. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan Puskesmas Tinanggea berasal dari Kapitasi JKN Puskesmas, Operasional APBD dan Bantuan Operasional Kesehatan. Dana Operasional yang didapatkan dari APBD masih tergolong kecil dan hanya mencukupi kebutuhan air dan listrik.

Berikut Realisasi Keuangan Puskesmas Tinanggea dari berbagai sumber dana:

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2018 – 2021

NO	Sumber Dana	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Operasional APBD	-	-	-	-
2	Bantuan Operasional Kesehatan	-	1.068.178.600	1.140.580.050	644.909.506
3	Kapitasi JKN	904.247.025	953.107.750	908.241.450	914.956.625
4	Non Kapitasi JKN	246.150.000	300.165.000	148.670.000	-
5	Subsidi	-	-	-	-
6	Non Subsidi	-	-	-	-
	Jumlah				

c. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana UPTD Puskesmas Tinanggea cukup lengkap dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun 2020 beberapa sarana masih perlu perhatian karena mengalami kerusakan sedang.

Sarana dan prasarana Puskesmas tersebut tersebar juga dalam Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes dan Poskesdes berikut ini:

Tabel 2.3. Jumlah Pustu, Pusling, Posyandu, Polindes, Poskesdes, Di UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2019 - 2021

N O	INDIKATOR	2019	2020	2021
1.	Jumlah Puskesmas Pembantu	2	2	2
2.	Jumlah Puskesmas Keliling	1	1	0
3.	Jumlah Posyandu	29	29	29
4.	Jumlah Polindes	2	2	2
5.	Jumlah Poskesdes	3	3	3
6.	Jumlah Poskestren	0	0	0

UPTD Puskesmas Tinanggea sudah memiliki mobil 2 unit ambulance dan sudah cukup memadai untuk pelayanan PONED dan pelayanan rujukan kegawatdaruratan 24 jam. Berikut adalah rincian dari sarana dan prasarana UPTD Puskesmas Tinanggea

Tabel 2.4 Sarana Prasarana di UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2021

No	Sarana	Jumlah / Kecukupan	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gedung Puskesmas	1	1	0	0
2	Gedung Pustu	2	0	0	2
3	Gedung Poskesdes	3	0	0	0

No	Sarana	Jumlah / Kecukupan	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
4	Mobil Operasional	0	0	0	0
5	Pusling	0	0	0	0
6	Ambulans	2	1	1	0
7	Mobil Jenazah	0	0	0	0
8	Motor Operasional	6	3	3	0
9	Alat kesehatan	554	474	7	75

UPTD Puskesmas Tinanggea juga memiliki sarana penunjang pelayanan Laboratorium.

C. KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS

1. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Upaya Promosi Kesehatan

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan selama tahun 2020 di UPTD Puskesmas Tinanggea. tidak mencapai target hal ini disebabkan, Kurangnya alokasi dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan promosi Kesehatan, kemudian banyaknya kegiatan yang tidak berjalan khususnya pada program Promosi Kesehatan yang diakibatkan karena pandemic Covid-19. Adapun indicator kinerja yang dilaksanakan namun belum mencapai target adalah penyelenggaraan PHBS TTU dan UKBM Institusi.

Tabel 2.5 Hasil Identifikasi Masalah Upaya Promosi Kesehatan (Promkes)
Berdasarkan Indikator PKP Puskesmas di
UPTD Puskesmas Tinanggea
Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PENCAP AIAN	KESENJAN GAN
1.	Penyelenggaraan PHBS Keluarga	50 %	-	-
	Penyelenggaraan PHBS di Sekolah	100 %	-	-
	Penyelenggaraan PHBS TTU	100%	24,1%	75,9
	Penyelenggaraan PHBS di Faskes	96 x	-	-
2.	KIP/K	96	-	-
3.	Penyelenggaraan Dalam Gedung	96 x	-	-
4.	Pembinaan PHBS Institsi Kesehatan	100 %	-	-
5.	Pemberdayaan individu / Kunjungan Rumah	-	-	-
6.	Pembinaan PHBS RT	75 %	-	-
7.	Strata Desa Siaga Aktif (Purnama & Mandiri)	100 %	-	-
8.	UKBM: Posyandu Strata Purnama dan mandiri	100%	41%	-59%
9.	Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa / Kelurahan, Camat, dan Lintas Sektor	12 x	-	-
10.	Penggalangan Kemitraan	12 x	-	-
11.	Orientasi Promkes Bagi Kader	183 orang	-	-
12.	Penggunaan Media KIE	5	-	-

	(Penyebarluasan Informasi)			
13.	Pendampingan Pelaksanaan SMD dan MMD Tentang Kesehatan	24 Desa	-	-

Sumber: Laporan PKP Puskesmas Tinanggea Tahun 2020

b. Upaya Kesehatan Lingkungan

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya kesehatan lingkungan selama tahun 2020 di UPTD Puskesmas Tinanggea pada umumnya sudah memenuhi target, hanya Jumlah Desa yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masalah saja yang dapat melebihi target kinerja dan Persentase inspeksi kesehatan Lingkungan terhadap sarana air bersih, pasar sehat, TFU dan TPM . Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan lingkungan pada Puskesmas Tinanggea

Tabel 2.6 Hasil Capaian Upaya Kesehatan Lingkungan di UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2021

No	INDIKATOR KEGIATAN	CAKUPAN (%)	TARGET (%)	KESENJANGAN
1	Jumlah Desa yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	71,4%	70%	+4%
2	Persentase penduduk terhadap akses air bersih yang memenuhi syarat	16,7%	60%	-43,3
3	Cakupan Pengawasan Jamban	94,43	75,00	+19,43
4	Persentase inspeksi kesehatan Lingkungan terhadap sarana air bersih, pasar sehat, TFU dan TPM	24,1%	75%%	-50,9%

Sumber: Laporan Profil Puskesmas Tinanggea Tahun 2020

c. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya kesehatan ibu, anak dan KB selama tahun 2020 di Puskesmas Tinanggea pada umumnya sudah memenuhi target. Namun demikian ada 5 (Lima) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan kunjungan Ibu Hamil K 4, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan, Cakupan Pelayanan Ibu Nifas dan Cakupan Kunjungan Neonatus KN Lengkap. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya kesehatan ibu, anak dan KB pada UPTD Puskesmas Tinanggea

Tabel 2.7 Hasil Capaian Upaya Kesehatan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana di UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PENCAPAIAN	KESENJANGAN
1.	KESEHATAN IBU	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	100%	76,0%	-24%
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100%	84,3%	-15,7%
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%	0%	0%
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%	91,2%	-8,8%
2.	KESEHATAN ANAK	Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN1)	100%	100%	-
		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	100%	99,4%	-0,6%
		Cakupan	100%	100%	-

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PENCAPAIAN	KESENJANGAN
		Komplikasi yang ditangani			
		Cakupan Kunjungan Bayi	100%	100%	-
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	100%	41,2%	-59,8%
3.	KELUARGA BERENCANA	Cakupan Peserta KB Aktif	75	69,6	-5,4%

Sumber : Laporan Profil UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2020

d. Upaya Gizi Masyarakat

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya gizi masyarakat selama tahun 2020 di UPTD Puskesmas Tinanggea pada umumnya sudah memenuhi target. Namun demikian ada 6 (enam) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan Balita di Timbang (D/S), Bayi 0 – 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif, Cakupan Balita yang naik berat badannya dan Cakupan rematri di sekolah yang mendapatkan TTD. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya Perbaikan Gizi masyarakat UPTD Puskesmas Tinanggea.

Tabel 2.8 Hasil Capaian Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Berdasarkan Indikator PKP Puskesmas di UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2021

No	INDIKATOR KEGIATAN	CAKUPAN (%)	TARGET (%)	KESENJANGAN (%)
1	Cakupan Balita Ditimbang (D/S): Balita yang ditimbang Berat Badannya	40,3	80	-39,7
2	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat IMD	52,9	50	+2,9
3	Balita 6 – 59 bulan dapat Kapsul Vitamin A	94,3	90	+4,3
4	Bayi 0 – 6 Bulan mendapatkan ASI Eksklusif	47,6	50	-2,4
5	Cakupan Balita yang Naik Berat Badannya	15,4	80	-64,6
6	Cakupan Balita yang mempunyai buku KIA	89	80	+9
7	Cakupan Rematri di sekolah yang mendapatkan TTD	0	75	-75
8	Cakupan Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT	94,1	80	+14,1
9	Cakupan Distribusi Tablet Fe 90 tablet pada ibu hamil	89,5	80	+9,5
10	Cakupan Balita Kurus yang mendapatkan PMT	100	100	-

Sumber : Laporan PKP Puskesmas Tahun 2020

Status gizi balita berdasarkan indeks BB/TB pada tahun 2020, jumlah gizi buruk sebesar 9 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Status gizi kurang sebesar 3,7% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 2%. Status gizi baik tahun 2020 sebesar 84.42% menurun dibanding tahun 2019 sebesar 92,76%. Status gizi lebih tahun 2020 sebesar 6,81% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 4,5%.

Indeks BB/U merupakan cara pengukuran status gizi yang menggambarkan status gizi saat ini (*Current Nutritional Status*) yang

sangat dipengaruhi oleh umur dan karakteristik BB yang labil akibat penyakit atau peningkatan status gizi.

Tabel 2.9 Hasil Perkembangan Status Gizi Balita Indikator BB/TB Di UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2021

Tahun	Sangat Kurus		Kurus		Normal		Gemuk	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2018	3	0,12	19	1,6	2180	83,9	78	3,1
2019	14	0,67	75	3,59	1936	92,76	62	2,97
2020	9	0,10	45	3,7	1266	84,42	90	6,81

Sumber Data : Hasil Dulan penimbangan Balita Tahun 2020

e. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit selama tahun 2020 di UPTD Puskesmas Tinanggea pada umumnya sudah memenuhi target. Namun demikian ada 5 (Lima) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil (TT2+), cakupan penderita pneumonia balita, cakupan Penemuan pasien baru TB BTA Positif, kesembuhan pasien TB BTA positif, dan Cakupan penemuan penderita diare. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada Puskesmas Tinanggea

Tabel 2.10 Hasil Capaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2021

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET %	PENCAPAIAN	KESENJANGAN	
1	PELAYANAN IMUNISASI DASAR	Cakupan BCG	95%	100%	+5%	
		Cakupan DPTHB 1	95%	100%	+5%	
		Cakupan DPTHB 3	95%	100%	+5%	
		Cakupan Polio 4	95%	100%	+5%	
		Cakupan Campak	95%	100%	+5%	
		Cakupan BIAS DT	95%	100%	+5%	
		Cakupan BIAS TT	95%	100%	+5%	
		Cakupan BIAS Campak	95%	100%	+5%	
		Cakupan Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil TT2+	95%	39%	-56%	
		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80%	100%	+20%	
		Cakupan Sistem Kewaspadaan Dini	100%	100%	0%	
			Cakupan Surveilans Terpadu Penyakit	100%	100%	0%
			Cakupan Pengendalian KLB	0%	0%	0%
2	PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT	Cakupan Penderita Pneumonia Balita	100%	28,10%	-71,9%	
		Cakupan Penemuan Pasien baru TB BTA Positif	100%	32%	-68%	
		Cakupan Kesembuhan Pasien TB BTA Positif	100%	85%	-15%	
		Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	0%	
		Cakupan Penemuan penderita Diare	1,143	319	-318	

2. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan

Penduduk di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tinanggea di Kecamatan Tinanggea cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan perumahan/pemukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kecamatan hingga luar kabupaten. Hal

tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien di UPTD Puskesmas Tinanggea dan Jaringan nya.

Tingkat kunjungan di UPTD Puskesmas Tinanggea makin meningkat setiap Tahun nya. Berikut gambaran kunjungan rawat jalan di UPTD Puskesmas Tinanggea

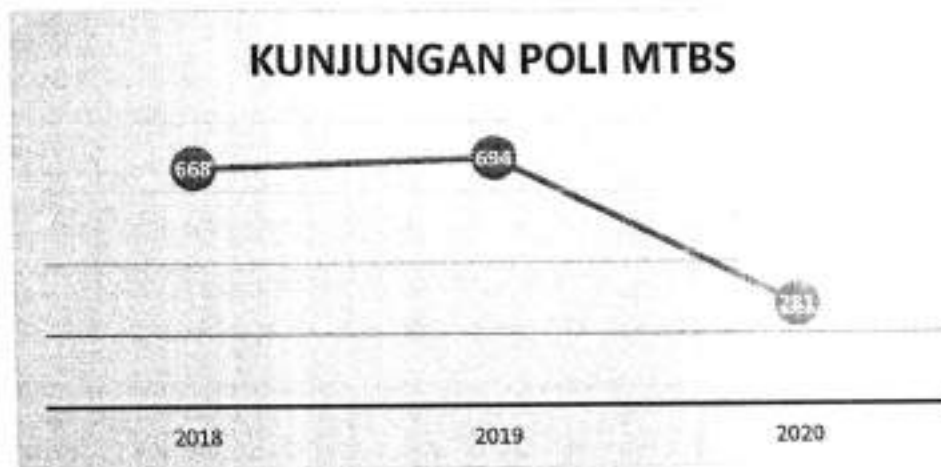
Tabel 2.11 Gambaran Kunjungan Rawat jalan di UPTD Puskesmas Tinanggea tahun 2018 s/d 2020

No	Unit Pelayanan	Jumlah		
		2018	2019	2020
1	UPTD Puskesmas Tinanggea	10.221	10.040	6.151
2	Pustu Lalonggasu	0	0	0
3	Pustu Moolo Indah	0	0	0
4	Polindes Lanowulu	0	0	0
5	Polindes Lalowatu	0	0	0
6	Poskesdes Palotawo	0	0	0
7	Poskesdes Wundumbolo	0	0	0
8	Poskesdes Matambawi	0	0	0
	Jumlah	10.221	10.040	6.151

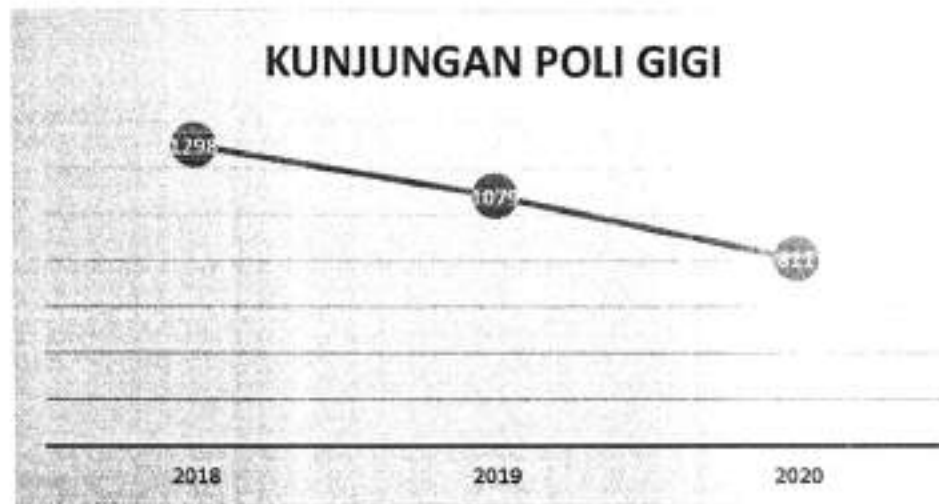
Kunjungan tiap Poli digambarkan pada grafik berikut ini:



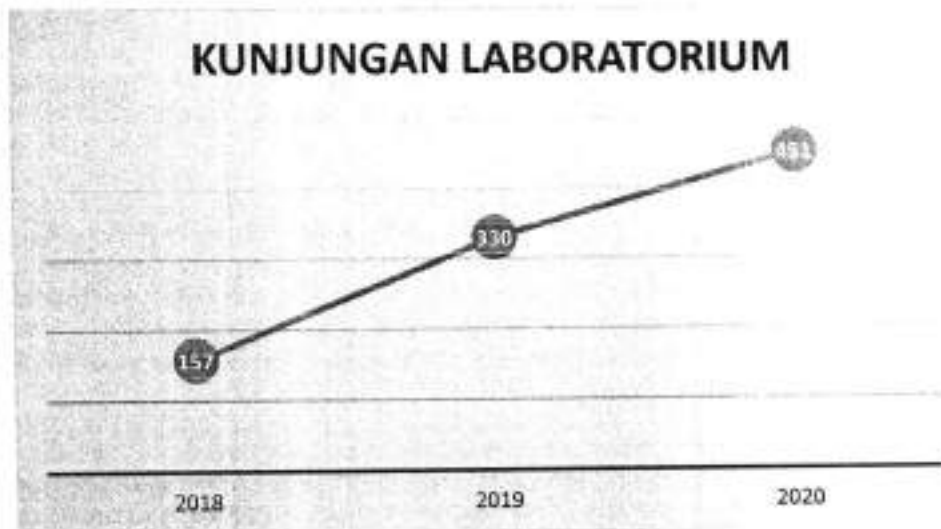
Gambar 2.1 Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Umum Puskesmas Tinanggea Tahun 2018-2020.



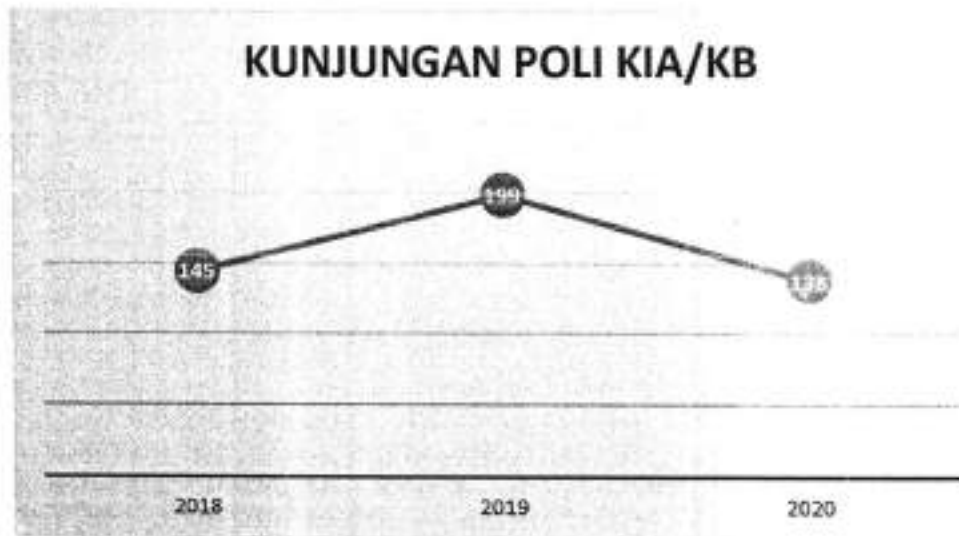
Gambar 2.2. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan MTBS UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2018-2020.



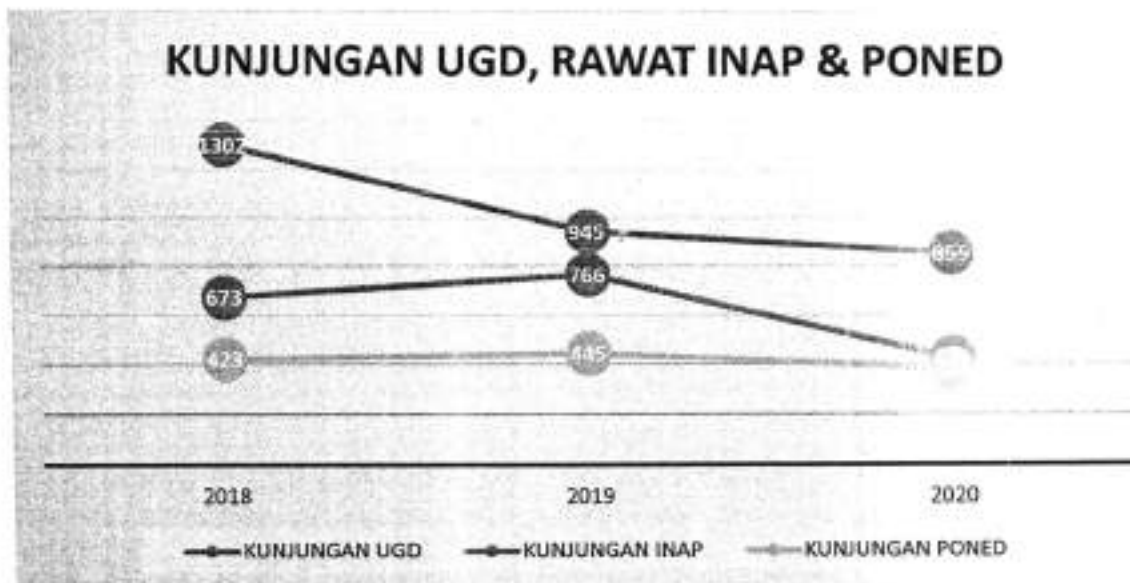
Gambar 2.3. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Gigi UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2018-2020.



Gambar 2.4. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Laboratorium UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2018-2020.



Gambar 2.5. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan KIA/KB UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2018-2020.



Gambar 2.8. Grafik Kunjungan UGD, rawat inap & PONED UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2018-2020.

3. Capaian Kinerja Administrasi dan Manajemen

UPTD Puskesmas Tinanggea melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di UPTD Puskesmas Tinanggea cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari 81.17%.



Gambar 2.8 Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT

Wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinanggea yang berada di kawasan perdesaaan dengan beberapa desa tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, memiliki potensi berbagai masalah kesehatan. Kurangnya PHBS dalam Tatanan Rumah Tangga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan Lingkungan. Penanganan sampah masih rendah juga ditemukan di beberapa Desa. Namun demikian terdapat juga peluang yang besar untuk penyelesaiannya.

Berapa masalah kesehatan masyarakat berkaitan dengan kinerja Puskesmas Tinanggea pada tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana

Capaian beberapa kegiatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB pasca salin masih mengalami beberapa masalah yaitu:

- Tingginya penemuan bumil risiko tinggi
- Rendahnya capaian KB pasca salin
- Kurangnya Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dasar (90% dari target 100%)

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi	1. Tingkat pendapatan penduduk
2. Banyak penduduk pendatang/urban dengan mobilisasi tinggi	2. Kemudahan mengakses sarana pelayanan kesehatan dengan dukungan infrastruktur dan sarana transportasi
3. Tingkat persaingan ekonomi yang tinggi	3. Adanya PONEB 24 jam
4. Penduduk pendatang yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan terdaftar di wilayah lain	4. Adanya jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Daerah walaupun dalam jumlah terbatas.
5. Kurangnya dukungan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar.	

Status Gizi

Capaian beberapa kegiatan gizi masih mengalami beberapa masalah yaitu:

- Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan sarana pelayanan Kesehatan seperti posyandu, posbindu, poslansia dll.
- Tingginya angka Stunting
- Tingginya kasus Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
- Tingginya Kasus Anemia pada Ibu Hamil
- Tingginya Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis)

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Luas wilayah dan jumlah sasaran yang tinggi. 2. Adanya Mitos dan Pola Asuh serta Pola yang kurang tepat dari Keluarga. 3. Adanya pembatasan social di akibatkan covid-19 sehingga pemberian tablet tambah darah pada rematri tidak terlaksana karena sekolah di istirahatkan 4. Adanya Penyakit Penyerta 5. Sanitasi yang tidak memenuhi syarat (STBM)	1. Kemudahan mengakses sarana pelayanan kesehatan dengan dukungan infrastruktur dan sarana transportasi 2. Adanya Distribusi PMT dan Tablet tambah darah 3. Adanya Dukungan Lintas Sektor 4. Pelaksanaan Skrining Ibu Hamil yang dilaksanakan berkesinambungan.

Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

Beberapa masalah penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang masih menjadi masalah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinanggea adalah:

- Tingginya Penemuan kasus baru TBC
- Tingginya Penemuan TB MDR

- Relative masih ditemukan kasus DBD
- Tingginya Penemuan Kasus COVID 19 dan adanya Kematian Kasus COVID 19
- Kasus Hepatitis Masih ditemukan

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<ol style="list-style-type: none">1. Kepadatan penduduk yang tinggi2. Fasilitas Pelayanan swasta di wilayah kerja yang tidak melaksanakan program UKM3. Populasi berisiko yang tersembunyi dan belum terjangkau4. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan test secara dini	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya kunjungan rawat jalan Puskesmas2. Adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin3. Skrining COVID 19 dalam pelayanan Puskesmas4. Pelaksanaan Testing, Tracking, dan Treatment COVID 195. tersedianya sarana prasarana testing (Tiple eliminasi HIV, Hepatitis B dan Sipilis serta RDT Antigen COVID 19) dan treatment serta adanya petugas tracer

Penyakit Tidak Menular

Masalah penyakit tidak menular di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinanggea diantaranya:

- Masih rendahnya cakupan penemuan kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus
- Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 tahun), 27% dari target 100%
- Masih rendahnya cakupan pemeriksaan skrining kanker leher Rahim
- Belum pernah dilakukan Skrining Retinoblastoma di Puskesmas
- Tingginya prevalensi obesitas dan risiko penyakit tidak menular lainnya.
- Kurangnya cakupan Penanggulangan Gangguan ODGJ yang berobat secara teratur

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran <i>skrining</i> kesehatan yang masih rendah 2. Masyarakat masih berpola pemikiran paradigma sakit 3. Kesadaran gaya hidup sehat masih rendah 4. Keterbatasan petugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesejahteraan penduduk 2. Kemudahan akses fasyankes

Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Masalah Perkesmas di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinanggea diantaranya:

- Kurangnya Cakupan Kunjungan KK Rawan

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Perawat yang belum dilatih perkesmas 2. Keterbatasan jumlah tenaga perawat 3. Kurangnya Koordinasi Lintas Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Akses ke Fasyankes 2. Puskesmas sebagai Sentra Keperawatan (<i>Nursing Centre</i>)

Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

Masalah pada UKM Pengembangan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinanggea diantaranya:

- Kurangnya cakupan Pembinaan Batra
- Kurangnya Cakupan Penderita Katarak yang mendapat Penanganan
- Kurangnya Cakupan Penanganan Rujukan UKGS

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki jaminan Kesehatan 2. Keterbatasan Kompetensi petugas 3. Kurangnya Koordinasi Lintas Program 4. Ketakutan masyarakat untuk melakukan pengobatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Akses ke Fasyankes 2. Adanya Program Operasi Katarak Masal

Kualitas Pelayanan dan Upaya Kesehatan Perorangan

UPTD Puskesmas Tinanggea dengan jaringan 2 (dua) Puskesmas Pembantu serta 3 (tiga) Poskesdes bersaing dengan beberapa klinik swasta, Dokter Praktek Mandiri dan Bidan Praktik Mandiri yang menjadi jejaring Puskesmas Tinanggea. Selain itu terdapat juga beberapa Puskesmas yang berbatasan wilayah atau dekat dengan wilayah kerja Puskesmas Tinanggea seperti: Puskesmas Atari, dan Puskesmas Andoolo, dan Puskesmas Amondo.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingan pelayanan kesehatan sangat tinggi. Hal tersebut menjadikan UPTD Puskesmas Tinanggea bertekad untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menangkap peluang potensi pengembangan layanan dan peningkatan kapasitas pelayanan dengan mempelajari perilaku pencarian pengobatan (*health seeking behaviour*) masyarakat.

Masalah kualitas pelayanan kesehatan pada UKP di Puskesmas sebagai berikut:

- Ketersediaan obat, alkes dan BMHP masih belum mencukupi
- Jumlah Perawat dan tenaga lain belum sesuai Analisis Beban Kerja
- Angka Kontak Komunikasi yang masih rendah
- Tingginya Angka Ratio Rujukan Non spesifik

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Tingkat persaingan dengan fasyankes swasta tinggi	1. Tingkat kesejahteraan masyarakat
2. Jumlah peserta JKN Puskesmas yang masih rendah dibanding jumlah penduduk	2. Kemudahan akses terhadap fasyankes
3. Keterbatasan jumlah tenaga perawat dan bidan	

4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Prosedur dan kriteria Rujukan 5. Kurangnya Sarana Alat kesehatan Pemeriksaan Penunjang	
---	--

B. ISU STRATEGIS

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UPTD Puskesmas Tinanggea terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian karena dapat secara signifikan menimbulkan kerugian pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan itu menjadi isu-isu yang harus dicari strategi penyelesaiannya. Permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia dan Gizi Masyarakat
2. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perbaikan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular serta Kesehatan Lingkungan
4. Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Perbaikan Cakupan program Pengembangan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Standar Akreditasi Puskesmas dan Perkembangan Teknologi Informasi
7. Pengembangan Posyandu Prima
 - a. Budaya Organisasi (tata nilai)

Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Tinanggea telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan melalui budaya

menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan kerjasama.

Contoh Tata Nilai:

UPTD Puskesmas Tinanggea memiliki Tata Nilai "**MEAMBO**".

- **Mandiri** dalam berkreasi dan berinovasi
- **Empati** terhadap Pasien dan masyarakat
- **Amana** dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
- **Melayani** dengan ikhlas
- **Bertaqwa** Kepada Tuhan yang MAHA ESA
- **Objekrif** dalam melayani pasien dan masyarakat

b. Sumber Daya Keuangan

Persiapan penerapan BLUD di Puskesmas Tinanggea dilaksanakan melalui: persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan pengelolaan sistem akuntansi keuangan BLUD, persiapan data dan dokumen pendukung serta persiapan sarana dan prasarana.

c. Sumber Daya Manusia

Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia di Puskesmas Puskesmas yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupun non formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan.

d. Sumber Daya Informasi

Implementasi Sistem Informasi (SIP) di Puskesmas sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan akan digantikan dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) pada tahun 2019 untuk seluruh Kabupaten Konawe Selatan Sedangkan pelayanan pasien JKN sudah menggunakan aplikasi *P-Care* dari BPJS Kesehatan.

Dukungan perangkat *hardware*, *software* dan jaringan di UPTD Puskesmas Tinanggea sudah terpenuhi melalui anggaran Kapitasi JKN Puskesmas melalui aplikasi SIPD termasuk eBMD dan eBLUD.

Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh Puskesmas, sistem pelaporan berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan oleh beberapa program seperti TB, Gizi, Posbindu PTM, HIV, PISP, Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja, dan kepegawaian.

e. Sumber Daya Teknologi

Pemenuhan peralatan kedokteran canggih sudah sebagian besar dimiliki oleh Puskesmas Tinanggea seperti, unit *Hematology Analyzer* untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkap, unit Cardiotokografi (CTG) untuk menilai kesejahteraan janin, unit diagnostik *vital sign* untuk pemeriksaan fisik pasien, unit nebulizer untuk tindakan gawat darurat serta *autoclave* untuk proses sterilisasi peralatan medis.

Selain peralatan kedokteran canggih, Puskesmas Tinanggea telah memiliki perangkat penunjang berbasis teknologi seperti perangkat komunikasi internal dan perangkat pengawasan kamera CCTV .

Pengadaan peralatan kedokteran dan perangkat berbasis teknologi tersebut berasal dari anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta anggaran kapitasi JKN Puskesmas.

f. Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan)

Sarana bangunan Puskesmas sejak tahun 2020 Tinanggea telah mengalami beberapa renovasi yang signifikan baik berupa perbaikan, penambahan ruangan, penambahan sarana bangunan, pengecatan

maupun penambahan dan penggantian perabot dan peralatan kantor.

Meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang belum terpenuhi yang telah masuk dalam perencanaan Puskesmas yaitu penambahan ruang TCM untuk pemeriksaan sample dahak TB, Ruang Informasi Puskesmas, Ruang Genset dan Tempat Vaksinasi Statis.

Seluruh anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana berasal dari anggaran Dinas Kesehatan dan Kapitasi JKN Puskesmas.

C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPTD Puskesmas Tinanggea adalah sebagai berikut:

1. *Related Diversification* (keanekaragaman)

Diversifikasi pada UPTD Puskesmas Tinanggea dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian (apoteker, asisten apoteker), perawat gigi, analis kesehatan, dan. Dengan demikian ada 11 (sebelas) jenis tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi layanan kesehatan rawat jalan, UGD 24 jam dan PONED.

Keanekaragaman layanan pada jam kerja pagi hari tergolong lengkap mulai pelayanan loket, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan anak/MTBS, pemeriksaan ibu dan anak, pemeriksaan penyakit menular seksual, konsultasi terpadu, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan farmasi.

Sedangkan *keanekaragam* layanan 24 jam yang ditunjang oleh tenaga perawat dan bidan profesional menyediakan gawat darurat, rujukan dan persalinan.

Semua keanekaragaman layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yaitu masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap.

2. Market Development (pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Tinanggea adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan misalnya peningkatan ragam layanan di Puskesmas Pembantu, Pelaksanaan Posyandu Prima dengan layanan Posyandu lansia, Posbindu dan sebagainya

Selain itu dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang banyak didominasi petani dan buruh maka Puskesmas Tinanggea membuka layanan gawat darurat 24 jam meskipun belum lengkap seperti pelayanan pagi hari.

Akses terhadap Puskesmas yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk memilih Puskesmas Tinanggea sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan.

Keterjangkauan biaya pelayanan di Puskesmas menjadikan Puskesmas Tinanggea memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih Puskesmas Tinanggea

Perkembangan pemukiman dan kawasan industri yang masih terus berjalan di wilayah Puskesmas, masih menyimpan potensi besar bagi Puskesmas untuk meningkatkan pengembangan pasar.

3. Product Development (pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tinanggea

dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain:

- a. Layanan pemeriksaan infeksi menular seksual seperti Gonore, Sifilis dan pemeriksaan HIV.
- b. Layanan pemeriksaan laboratorium lengkap meliputi pemeriksaan Darah Lengkap menggunakan alat Hematology Analyzer, Urin analyzer, kimia klinik menggunakan alat fotometer dan pengiriman spesimen pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk deteksi penyakit Tuberkulosis.
- c. Layanan pemeriksaan IVA untuk deteksi dini kanker leher rahim.
- d. Layanan apotik 24 jam
- e. Layanan pemeriksaan USG oleh dokter ahli kandungan
- f. Layanan poli spesialis ahli dalam dan kandungan
- g. Layanan poli khusus lansia
- h. Layanan vaksinasi
- i. Layanan perawatan kelas dan VIP

Selain mengembangkan produk khusus, Puskesmas juga mengembangkan *modelling* dan *special services* seperti: Layanan lansia *one stop service*, layanan pemeriksaan ibu hamil terpadu (ANC Terpadu), layanan pemeriksaan anak dengan pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), Kelas ibu hamil, program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) dan Posbindu khusus di instansi (sekolah).

4. Vertical Integration (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Konawe Selatan

Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila diikuti dengan perilaku pencarian pengobatan yang baik maka Puskesmas akan menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lokasi Puskesmas yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam.

Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Tinanggea. sampai dengan tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan.

5. Pengembangan Jenis Pelayanan

Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan Puskesmas Tinanggea setiap tahun mengharuskan Puskesmas Tinanggea untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada pasien. Mengurangi waktu tunggu di unit pendaftaran maupun di poli merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan pasien lebih meningkat. Oleh karena itu, Puskesmas Tinanggea akan mengembangkan *electronic medical record (E-medical record)*.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien, Puskesmas Tinanggea juga akan membuka layanan pemeriksaan *USG* oleh dokter umum dan pengobatan tradisonal.

Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di Puskesmas Tinanggea yaitu:

- a. *E-medical record*
- b. Pemeriksaan *USG* Abdomen oleh dokter umum
- c. Klinik Spesialis
- d. Layanan apotik 24 jam
- e. Layanan pemeriksaan *USG* oleh dokter ahli kandungan

- f. Layanan poli spesialis ahli dalam dan kandungan
- g. Layanan poli khusus lansia
- h. Layanan vaksinasi
- i. Layanan perawatan kelas dan VIP

6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi Puskesmas dan peningkatan kunjungan Puskesmas.

Sistem antrian loket yang lebih mudah dan transparan akan dibutuhkan jika tingkat kunjungan makin meningkat.

Ruang tunggu khusus pasien lansia diperlukan sebagai perwujudan Puskesmas santun lansia. Sedangkan ruang tunggu pasien menular digunakan untuk tempat pasien TB Sensitif Obat maupun Resisten Obat yang harus meminum obat di bawah pengawasan petugas.

Kebutuhan akan lahan parkir roda 2 (dua) di lahan Puskesmas yang terbatas menyebabkan Puskesmas dapat mendesain tempat parkir di lantai atas.

Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana meliputi:

- a. Ruang Informasi/ Skrining Pasien
- b. Ruang Konseling Terpadu
- c. Ruang TCM
- d. Ruang Perawatan Kelas
- e. Ruang Perawatan VIP
- f. Ruang Vaksinasi
- g. Ruang Apotik 24 Jam
- h. Ruang Poli Lansia
- i. Antrian Khusus Lansia

- j. Ruang Poli Ahli Kandungan
- k. Ruang Poli Ahli Penyakit Dalam
- l. Ruang Perawatan Pasca Bersalin
- m. Gudang dan Ruang Arsip
- n. Pengadaan Dental Unit
- o. Pengadaan Kendaraan Pusling Roda 4
- p. Pengadaan Kendaraan Pusling Roda 2
- q. Tempat Parkir kendaraan roda 2

7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Seiring dengan meningkatnya kunjungan dan upaya antisipasi program UHC (*Universal Health Coverage*) yang akan meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan, maka Puskesmas Tinanggea perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi:

- a. Penambahan dokter umum, spesialis kandungan, dan spesialis ahli dalam
- b. Penambahan tenaga perawat dan bidan
- c. Penambahan tenaga ahli akutansi
- d. Penambahan tenaga ahli komputer (IT)
- e. Penambahan tenaga ahli sanitasi lingkungan
- f. Penambahan tenaga rekam medik
- g. Pelatihan tenaga medis dan paramedis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI PUSKESMAS

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi Puskesmas disusun berdasarkan Visi Kabupaten Konawe Selatan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Jika terjadi perubahan visi pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan yang dalam hal ini diterjemaahkan oleh Puskesmas Tinanggea, maka visi Puskesmas juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi UPTD Puskesmas Tinanggea tahun 2021 - 2026 adalah :

" MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU KECAMATAN TINANGGEEA SEHAT ".

Keterkaitan visi Puskesmas dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan yaitu: **"MENUJU KONAWA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN AMANAH BERBASIS PERDESAAN TAHUN 2021"**. Visi Tersebut akan diwujudkan dengan Misi Ke-2 yaitu : **"MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"**

Visi UPTD Puskesmas Tinanggea sejalan dengan cita-cita Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan kesehatan. Selain melalui pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat.

B. MISI, MOTTO DAN TATA NILAI PUSKESMAS

Berdasarkan Misi yang ada dalam RPJMD Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, misi yang terkait dengan program di UPTD Puskesmas Tinanggea adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu serta dapat dijangkau dan mudah pada semua masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Tinanggea
2. Mewujudkan Manajemen Layanan Kesehatan yang berkualitas di wilayah UPTD Puskesmas Tinanggea
3. Menciptakan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan yang Unggul di UPTD Puskesmas Tinanggea
4. Menciptakan lingkungan sehat di wilayah UPTD Puskesmas Tinanggea yang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat

Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau semua masyarakat, UPTD Puskesmas Tinanggea berusaha meningkatkan pelayanan di Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Puskesmas keliling serta menempatkan Bidan Desa atau Perawat di Daerah Binaan, adanya pelayanan Upaya kesehatan Masyarakat di Luar Gedung UPTD Puskesmas Tinanggea

Agar dapat mewujudkan Manajemen Layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka, UPTD Puskesmas Tinanggea membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas dilaksanakan melalui penilaian kinerja Puskesmas.

Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan kegiatan promkes dan kesling serta meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Untuk terciptanya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Unggul maka UPTD Puskesmas Tinanggea membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan dengan membuat Analisis Beban Kerja dan peningkatan kapasitas SDM melalui In House training, Workshop, pelatihan dan lain-lain.

Semua upaya untuk menjalankan misi mencapai visi Puskesmas tersebut perlu dilambungkan dalam suatu moto yang menjiwai seluruh personel dalam organisais Puskesmas. Moto atau juga semboyan (bahasa Inggris: motto) adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi UPTD Puskesmas Tinanggea , maka ditentukanlah Motto UPTD Puskesmas Tinanggea sebagai berikut:

Motto :

UPTD Puskesmas Tinanggea“ Semangat Sehat “

Semangat : SEhat, MANDiri, uNGgul dan Amanah.

Sehat :

Santun dalam Melayani

Empati terhadap pengguna Pelayanan

Hindari Korupsi dan Pungli

Amanah dalam mengemban tugas

Tepat dan cepat

Tata Nilai UPTD Puskesmas Tinanggea :

UPTD Puskesmas Tinanggea memiliki Tata Nilai dan Budaya yang perlu diterapkan pada individu semua personel di Lingkungan UPTD Puskesmas Tinanggea dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu **MEAMBO** :

- **Mandiri** dalam berkreasi dan berinovasi
- **Empati** Terhadap Pasien dan masyarakat
- **Amana** dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
- **Melayani** dengan ikhlas
- **Bertaqwa** Kepada Tuhan yang MAHA ESA
- **Objektif** dalam melayani pasien dan masyarakat

C. TUJUAN PUSKESMAS

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- Memberikan Pelayanan Yang bermutu yang Terjangkau dan Mudah bagi Pasien maupun Masyarakat.
- Meningkatkan sumberdaya manusia Puskesmas yang berkualitas
- Meningkatkan Pencapaian Program, Menurunkan angka Kematian Ibu dan anak, meningkatkan status Gizi ibu hamil dan anak, menurunkan angka Penyakit menular, Meningkatkan Kemandirian Hidup Sehat Bagi Keluarga dan Masyarakat, dan meningkatkan lingkungan sehat baik individu maupun kelompok masyarakat

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan UPTD Puskesmas Tinanggea adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, status gizi dan pengendalian dengan pelayanan kesehatan bermutu”

D. SASARAN PUSKESMAS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Sasaran dan indikator sasaran UPTD Puskesmas Tinanggea berdasarkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPTD Puskesmas Tinanggea Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan	1	Angka Kematian Ibu (AKI)
		2	Angka Kematian Bayi (AKB)

pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas	yang dan	pelayanan kesehatan	3	Persentase balita gizi buruk/stunting
			4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			7	Pelayanan Kesehatan Balita
			8	Pelayanan kesehatan usia sekolah Dasar
			8	Pelayanan kesehatan usia Reproduksi (15-59 tahun)
			9	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut >60 tahun
			10	Persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri
			11	Persentase desa STBM dan PHBS
			12	Persentase desa yang mencapai <i>UCI</i>
			13	Persentase KLB yang ditanggulangi < 24 jam

	14	Persentase keberhasilan pengobatan TB
	15	<i>RFT</i> penderita kusta
	16	Case Fatality Rate DBD
	17	Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
	18	Cakupan temuan kasus pemasangan pada ODGJ berat
	19	Persentase desa yang memiliki Posbindu PTM
	20	Penyehatan makanan dan minuman
	21	Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan fasyankestrad memiliki ijin
	22	Mutu Pelayanan Puskesmas
	23	Mutu Pelayanan Pustu dan Poskesdes

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT.

Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut:

Analisis SWOT untuk tujuan Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, status gizi dan pengendalian dengan pelayanan kesehatan bermutu

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Sistem manajemen yang berlaku (akreditasi FKTP)2. Adanya Komitmen pimpinan3. Adanya Alat Kesehatan yang mencukupi untuk beragam jenis layanan (alat pemeriksaan umum, pemeriksaan laboratorium Sederhana.)4. Adanya sarana yang memadai (gedung, kendaraan pusling, sarana IPAL)5. Adanya jenis ketenagaan yang mencukupi (dokter, apoteker, dokter gigi, perekam medis, perawat, bidan, ahli gizi, perawat gigi, sanitarian, analis medis, kesehatan masyarakat dan administrasi)6. Adanya akses yang mudah terjangkau masyarakat7. Adanya tarif pelayanan yang terjangkau	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan jumlah dan beberapa jenis tenaga penunjang, seperti perawat, bidan, Pranata Laboratorium, Pranata Komputer, Perekam medik, tenaga administrasi umum dan pelaksana program dibanding beban kerja pelayanan UKP dan program UKM2. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas yang sudah terpenuhi3. Keterbatasan anggaran operasional (listrik, air, internet, kebersihan, dll)4. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana (gedung, alat kesehatan, kendaraan, IPAL,

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<p>8. Adanya layanan program yang mendukung promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (pencegahan HIV dan IMS, kanker leher rahim, hepatitis, tuberkulosis, dll)</p> <p>9. Adanya Dukungan lintas sektor</p>	<p>dll)</p> <p>5. Rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai non PNS</p> <p>6. Rendahnya kemampuan Puskesmas menjangkau peserta JKN di luar wilayah Puskesmas</p> <p>7. Tingginya Ratio Rujukan Non spesialistik</p>

Faktor Eksternal - Peluang

Peluang (O)	SO	WO
1. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kesehatan	<p>1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik dan peningkatan strata akreditasi Puskesmas (S1, O1)</p> <p>2. Mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3, O1)</p> <p>3. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O1)</p> <p>4. Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (S5, O1)</p> <p>5. Mengoptimalkan informasi tarif pelayanan yang terjangkau kepada masyarakat luas (S7, O1)</p>	<p>1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas (W1,O1)</p> <p>2. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas (W3,O1)</p> <p>3. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas (W4,O1)</p> <p>4. Mengatasi rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai Non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas (W5,O1)</p>
2. Adanya dukungan kebijakan daerah tentang pemenuhan sarana dan operasional Puskesmas	Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (S2,O2)	<p>1. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W3,O2)</p> <p>2. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W4,O2)</p>

Peluang (O)	SO	WO
3. Adanya dukungan Kebijakan Pengadaan Formasi Pegawai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan	1. Mengoptimalkan jenis dan jumlah tenaga yang ada di UPTD Puskesmas melalui pembagian tugas tambahan kepada tenaga dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi pegawai(S5, O3)	1. Mengatasi Keterbatasan jumlah tenaga yang belum sesuai dengan standar baik secara standar permenkes 43 tahun 2019 maupun ABK (W1, O3)
4. Adanya Kebijakan Universal Health Coverage (UHC) sistem Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3, O3) 2. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O3) 3. Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (S5, O3) 4. Mengoptimalkan informasi keberadaan, layanan JKN dan keunggulan Puskesmas melalui berbagai sarana informasi (S6, O3) 5. Mengoptimalkan informasi layanan program yang dapat diperoleh masyarakat di Puskesmas (S8, O3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN (W1,O3) 2. Mengatasi keterbatasan kapasitas petugas kesehatan melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN (W2,O3) 3. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN (W3,O3) 4. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN (W4,O3)

Faktor Eksternal - Ancaman

Ancaman (T)	ST	WT
1. Tingginya jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kompetitor dan jarak yang terlalu dekat antar FKTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu akreditasi Puskesmas (S1,T1) 2. Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan Puskesmas (S6, T1) 3. Mengoptimalkan layanan program dan kegiatan luar gedung sebagai differensiasi layanan Puskesmas (S8, T1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan untuk mengatasi Jarak Fasilitas Kesehatan Kompetitor yang terlalu dekat (W1, T1) 2. Mengatasi keterbatasan Puskesmas menjangkau peserta JKN di luar

Ancaman (T)	ST	WT
		wilayah dengan teknologi komunikasi untuk mengatasi kompetitor FKTP (W6, T1)
2. Tingginya Kesadaran masyarakat tentang hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu, panduan SOP pelayanan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas sebagai dasar hukum kinerja pelayanan Puskesmas (S1, T2) 2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang masalah perlindungan hukum (S2,T2) 	Mengatasi rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai Non PNS untuk mengatasi kesadaran masyarakat tentang hukum (W5,T2)
3. Kebijakan pelayanan JKN yang berubah-ubah dan tidak menguntungkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu, panduan SOP pelayanan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas sebagai kebijakan pelayanan JKN di Puskesmas (S1, T3) 2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang kebijakan pelayanan JKN di Puskesmas (S2,T3) 	<p>Mengatasi rendahnya gaji/ jasa pelayanan pegawai non PNS untuk mengatasi kebijakan pelayanan yang berubah-ubah dan tidak menguntungkan (W2.T2)</p> <p>Mengatasi Tingginya Ratio Rujukan Non spesialisik dengan edukasi kepada masyarakat tentang 144 jenis penyakit yang dapat dilayani di FKTP secara</p>

Ancaman (T)	ST	WT
		tuntas (W7, T3)

Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT tersebut Strategi maka dapat disusun kerangka strategi Puskesmas Tinanggea untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	1 posyandu lansia dengan pemenuhan alkes dan Bahan Habis Pakai posyandu lansia
		2 Penanganan masalah gizi kurang, buruk dan Stunting pada bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui	2 Menetapkan layanan untuk ibu dan anak seperti ANC terpadu, persalinan 24 jam, pemeriksaan MTBS, KB pasca salin.
		3 Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	3 Meningkatkan Sosialisasi dan Menetapkan anggaran peningkatan kapasitas petugas dan kader

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			setiap tahun dan meningkatkan promosi kesehatan melalui media sosial . Penyebarluasan informasi/ kampanye PHBS
		4 Peningkatan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan	4 Menetapkan layanan pemeriksaan infeksi menular seksual dan HIV, layanan IVA, Posbindu, peningkatan Testing, Tracking dan Treatment COVID 19
		5 Peningkatan pembinaan dan kerjasama jejaring dan jaringan Puskesmas	5 Membentuk jejaring kerjasama dengan BPM, klinik dan RS melalui supervisi dan pembinaan
		6 Peningkatan mutu pelayanan, kecukupan dan kualitas SDM, sarana prasarana dan perbekalan kesehatan.	6 Menganggarkan pelatihan SDM kesehatan, mencukupi kebutuhan jenis SDM sesuai standar akreditasi Puskesmas dan pengadaan obat serta perbekalan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			kesehatan melalui kapitasi JKN
		7 Pengembangan layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan bidang Kesehatan	7 Menetapkan UGD dan pelayanan PONED 24 jam.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kegiatan indikatif merupakan kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari program lima tahunan (2021-2026) untuk dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan UPTD Puskesmas Tinanggea Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. Adapun uraian Program dan kegiatan indikatif selama lima tahun (2021-2026) secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh UPTD Puskesmas Tinanggea, pada tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PENDAPATAN	THN 2021	THN 2022	THN 2023	THN 2024	THN 2025	THN 2026
1	Pendapatan Layanan						
	- Jasa Pelayanan Medis	7.706.000	40.290.000	44.319.000	48.750.900	53.625.900	58.988.589
	- Jasa Pelayanan Penunjang Medis	935.000	3.150.000	3.937.500	4.921.875	5.414.065	6.767.581
	- Jasa Pelayanan Non Medis	1.365.000	7.105.000	8.881.250	11.101.562	12.211.718	15.264.648
	- Kapitasi JKN	1.000.300.000	1.150.000.000	1,265,000,000	1.391.000.000	1,530.650.000	1.683.715.000

	- Non Kapitasi JKN	318.600.000	350.460.000	385.506.000	424.056.600	466.462.260	513.108.486
	- Layanan Kesehatan lain-lain	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Hibah						
	- Terikat	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
	- Tidak Terikat	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Kerjasama						
	- Kerjasama Operasional	-	-	152.500.000	152.500.000	163.175.000	174.597.250
	- Kerjasama Pemanfaatan Aset	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	12.500.000
4	APBD						
	- Belanja Operasional APBD	-	24.988.700	27.487.570	30.236.327	33.259.959	36.585.955
	- Bantuan Operasional kesehatan	-	-	-	-	-	-

5	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah						
	- Pengemba ngan Usaha	-	-	-	36.600.0 00	40.260.0 00	44.286. 000
JUMLAH		2.078.9 06.000	2.325.99 3.700	2.644.63 1.320	2.856.16 7.264	3.062.05 8.992	3.295.8 13.509

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan UPTD Puskesmas

- a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat UPTD Puskesmas;
 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SDPD;
 3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SDPD;
 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-;
 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-; dan
 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja

- b. Kegiatan administrasi keuangan UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan;
 4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi
 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran; dan
 8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

- c. Kegiatan administrasi barang milik daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
 2. Pengamanan barang milik daerah;
 3. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah;
 4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
 5. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 6. Penatausahaan barang milik daerah; dan
 7. Pemanfaatan barang milik daerah.
- d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana prasarana disiplin aparatur;
 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 3. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 4. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
 5. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 6. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
 7. Bimbingan teknis implementasi perundang undangan.
- e. Kegiatan administrasi umum perangkat UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 3. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 4. Penyediaan bahan logistik kantor;
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 6. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang undangan;
 7. Penyediaan bahan/material;
 8. Fasilitas kunjungan tamu;
 9. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;

10. Penatausahaan arsip dinamis; dan
 11. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis Elektronik .
- f. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas;
 2. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
 3. Pengadaan mebel;
 4. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 5. Pengadaan asset tetap lainnya;
 6. Pengadaan asset tak berwujud;
 7. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 8. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya; dan
 9. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- g. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- h. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas;
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 3. Pemeliharaan mebel;
 4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
9. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- i. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 2. Pengembangan Puskesmas;
 3. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
 5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 7. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 8. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 9. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 10. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 11. Pengadaan Obat, Vaksin;
 12. Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 13. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 14. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 15. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
 19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
 21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional;
 24. Operasional Pelayanan Puskesmas;

25. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
 26. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah; dan
 27. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;
 2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
 3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet;
 4. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; dan
 5. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

- a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar; dan
 2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
- b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan , dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan;

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.

- 4.1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 4.2 Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
- 4.3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada SMK. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD SMK ini.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis pada UPTD Puskesmas Tinanggea yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kesehatan puskesmas dalam kurun waktu anggaran 2021 sampai dengan 2026 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of Action (RPK/POA) Puskesmas yang akan dituangkan dalam RBA belanja kegiatan serta laporan penilaian kinerja tahunan. Rencana Strategis juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Penerapan BLUD pada Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Semoga ke depannya, upaya yang dilakukan UPTD Puskesmas Tinanggea sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur dan mendapat dukungan dan partisipasi pengelola Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materil, administratif maupun politis. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan selanjutnya, Rencana Strategis akan dievaluasi pada pertengahan periode dan akhir periode sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis UPTD Puskesmas Tinanggea melibatkan stakeholder terkait penyusunan kegiatan lintas program, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tentunya seluruh tujuan dan sasaran yang direncanakan tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan kerjasama dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan UPTD Puskesmas Tinanggea dan jaringannya. Rencana strategis selanjutnya akan diuraikan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh Puskesmas di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen Puskesmas yang berkualitas.

Besar harapan untuk periode lima tahun ke depan, seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama menuju terwujudnya Kabupaten Konawe Selatan yang mandiri dalam bidang kesehatan sesuai visi Kabupaten Konawe selatan yaitu Kabupaten Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan Tahun 2021.

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS TINANGGEEA

RENCANA STRATEGIS

UPTD PUSKESMAS TINANGGEEA TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN: Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Indikator Kinerja UPTD Puskesmas Tinanggea yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Dinas Kesehatan	80%	80%	85%	85%	90%	90%	90 %
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100 %
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100 %
4	Cakupan Pelayanan Anak Balita	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100 %

								%
5	Cakupan kunjungan bayi	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Posyandu Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	9	11	13	15	17	20	20
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Balita ditimbang berat D/S	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
10	Persentase Penyakit menular yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Kelurahan/desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
12	Persentase Masyarakat Tidak Mampu yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%

SASARAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan

NO	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	KONDISI AWAL 2021	TARGET PER TAHUN					STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH	1	0	0	0	0	0	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH	2	0	0	0	0	0	Penanganan masalah gizi kurang, buruk dan stunting pada bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Persentase balita stunting	(Jumlah balita dengan PB/TB kurang / jumlah balita yang ukur) x 100%	11,57%	21,1%	20,1%	19,2%	18,1%	17,2%	Penanganan masalah gizi kurang, buruk dan stunting pada bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan	58,4%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		swasta/Jumlah Ibu Hamil dalam 1 tahun) x 100%									
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan/Jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	(Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar/ Jumlah Sasaran) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan Kesehatan Balita	(Jumlah balita 0 - 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu	46,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		tahun / Jumlah Sasarandalam 1 tahun) x 100%								
8	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar/ Jumlah sasaran) x 100%	93,1%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan kesehatan usia Reproduksi	(Jumlah pengunjung usia 15 - 59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah Sasaran) x100%	93,3%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut >60 tahun	(Jumlah seluruh lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / jumlah	58,4%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		seluruh lansia di wilayah kerja Puskesmas) x100%								
11	Persentase desa STBM	(jumlah desa yang melaksanakan STBM dan PHBS / jumlah seluruh desa yang ada) x 100%	47%	50%	50%	50%	50%	50%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
13	Persentase desa yang mencapai UCI	(Jumlah desa UCI / jumlah seluruh desa yang ada) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14	Persentase KLB yang ditanggulangi < 24 jam	(Jumlah KLB yang ditanggulangi < 24 jam / jumlah KLB yang ada) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Persentase keberhasilan pengobatan TB	(Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap / jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

16	RFT penderita kusta	(Jumlah penderita baru PB satu tahun sebelumnya dan MB dua tahun sebelumnya menyelesaikan pengobatan / jumlah penderita baru PB satu tahun sebelumnya dan MB dua tahun sebelumnya yang mulai pengobatan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
17	Case Fatality Rate DBD	(Jumlah penderita DBD meninggal / jumlah semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani] x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
18	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam	52,7%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		kurun waktu satu tahun								
19	Pelayanan Kesehatan Penderita DM sesuai standar	(Jumlahpenyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/jumlah sasaran penderita DM) x 100%	85,8%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
20	Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Puskesmas dan jaringannya dalam kurun waktu 1 tahun / Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV) x 100%	85,4%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
21	Cakupan temuan kasus	(Jumlah pasien pasung yang ditemukan /	63,6%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tdak	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

	pemasangan pada ODGJ berat	jumlah ODGJ dalam periode waktu tertentu) x 100							menular serta kesehatan lingkungan	Upaya Kesehatan Masyarakat
22	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	(Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu setahun / jumlah sasaran) x 100%	77,4%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
23	Persentase desa yang memiliki Posbindu PTM	(Jumlah desa yang memiliki Posbindu PTM / jumlah seluruh desa yang ada) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengaduan masyarakat tentang kesehatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
24	Penyehatan makanan dan minuman	(Jumlah TPM dilakukan IKL / Jumlah seluruh TPM di wilayah kerja) x 100%	80%	50%	50%	50%	50%	50%	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
25	Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan fasyan kestrad	(Jumlah Fasyankes dan fasyankestrad memiliki ijin / jumlah seluruh fasyankes dan fasyankestrad di wilayah kerja	22%	100%	100%	100%	100%	100%		Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	pemeriksaan penjangkaran kesehatan							
6	Pelayanan kesehatan pada lansia	(Jumlah penduduk usia >60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah semua penduduk usia >60 tahun di wilayah kerja) x 100 %.	85%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase rumah tangga STBM	(Jumlah rumah tangga yang dipicu 5 pilar STBM / jumlah seluruh rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas) x 100%	85%	60%	60%	60%	60%	60%
8	Persentase tempat dan fasilitas umum(TFU)	(Jumlah TTU yang diperiksa penychatan lingkungan / jumlah seluruh TTU yang ada) x 100%	95%	70%	70%	70%	70%	70%
9	Persentase rumah tangga ter PHBS	(Jumlah rumah tangga ber PHBS / jumlah seluruh rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas) x 100%	85%	60%	60%	60%	70%	70%
10	Persentase bayi mendapatkan IDL	(Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang mendapatkan IDL / jumlah sasaran bayi 0-11 bulan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan PE	(Jumlah penyakit potensi wabah yang dilakukan penylidikan epidemiologi / jumlah penyakit potensi wabah) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)	(Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan selama periode satu tahun / jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas) x 100.000	77,4%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kasus defaulter kusta	(Jumlah kasus PB / MB yang tidak menyelesaikan pengobatan / jumlah kasus baru PB/MB yang mulai pengobatan pada periode yang sama) x 100%	2/100.000	5/100.000	5/100.000	5/100.000	5/100.000	5/100.000
14	Insiden / angka kesakitan DBD	(Jumlah kasus baru penderita DBD dalam kurun waktu tertentu / jumlah populasi dalam kurun tertentu) x 100.000	9,5%	11%	10%	9,5%	8,5%	7,5%

(1)	(2)	(3)	(Output) (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan UPTD Puskesmas																		
		Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %				
		Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat UPTD Puskesmas	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD	
Koordinasi dan penyusunan	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	Pejabat pengelola	BLUD			

dokumen RKA																	keuangan	
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
Koordinasi dan penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Pejabat pengelola keuangan	BLUD
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Pejabat pengelola keuangan	BLUD
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
Kegiatan administrasi keuangan	Persentase pelaksanaan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Pejabat pengelola	BLUD

	UPTD Puskesmas	an tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu															keuangan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Frekuensi Pembayaran Gaji	14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		Tata Usaha	BLUD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Pembayaran Honor ASN	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Tata Usaha	BLUD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Jumlah laporan Keuangan	1 laporan	1.00 0.00 0	1 laporan	1.00 00. 00 0	1 laporan	1.00 0.00 0	1 laporan	1.000. 000	1 laporan	1.00 0.00 0	1 laporan	1.00 0.00 0	1 laporan	1.00 0.00 0	Pejabat pengelola keuangan	BLUD

Verifikasi Keuangan																			
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	1 laporan	500.000	1 laporan	50.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen SPJ	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Jumlah Laporan keuangan Semester	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD

	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
	Kegiatan administrasi barang milik daerah	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Penyusunan perencanaan kebutuhan	Terlaksananya Kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		Pengelola barang	BLUD

	barang milik daerah	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
	Pengamanan barang milik daerah	Honorarium Penjaga Malam	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	Pejabat Pengelolaan Keuangan	JKN
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah Koordinasi BMD	1 kali		1 kali		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Pengelolaan barang	BLUD	
	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Jumlah Dokumen Kartu Inventarisasi Barang (KIB)	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	Pengelolaan barang	JKN
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	Persentase Tertib	100 %		100 %		100 %	100%		100 %		100 %		100 %		Pengelolaan barang	BLUD	

		admini str asi dan pelapor an secara akunta bel dan tepat waktu																
	Peningkata n sarana prasarana disiplin aparatur	Jumlah Sarana dan Prasara na	1 pake t		1 pake t		1 pake t		1 paket		1 pake t		1 pake t		1 pake t		Pengel ola baran g	BLUD
	Pengadaa n pakaian dinas beserta atribut kelengkap annya	Jumlah Pakaia n Dinas	-		-		1 pake t		1 paket		1 pake t		1 pake t		1 pake t		Tata usaha	BLUD
	Pendataan dan pengolaha n administra si kepegawal an	Jumlah Dokum en Kepega wai an (DUK)	1 dok ume n		1 dok ume n		1 dok ume n		1 doku men		1 dok ume n		1 dok ume n		1 dok ume n		Tata usaha	BLUD

	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawain	Frekuensi Koordinasi	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		Tata usaha	BLUD
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monev Kinerja Pegawai	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Tata usaha	BLUD
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN Yang Melaksanakan Diklat Tupoksi	-		-		2 orang	5.000.000	2 orang	5.000.000	2 orang	5.000.000	2 orang	5.000.000	2 orang	5.000.000	Tata usaha	JKN/BLUD
	Bimbingan teknis implementasi perundang undangan	Jumlah ASN /Non ASN Yang Malaksanakan Bimtek					100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Tata usaha	JKN/BLUD

	Kegiatan administrasi umum perangkat UPTD Puskesmas	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	Frekuensi penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100 %	-	100 %	1.622.000	100 %	2.000.000	100%	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Penyediaan peralatan / bahan	Jumlah peralatan dan	100 %	13.449.000	100 %	23.449.031	100 %	25.793.934	100%	28.373.328	100 %	31.210.660	100 %	34.331.726	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD

kegiatan kantor	Perlengkapan Kantor																	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga	100 %	-	100 %	1.000.000	100 %	5.000.000	100%	6.000.000	100 %	7.000.000	100 %	7.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
Penyediaan bahan logistik kantor	Frekuensi penyediaan Bahan Logistik	100 %		100 %		100 %		100%	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Frekuensi penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	20.803.000	100 %	22.883.300	100 %	25.171.630	100%	27.688.793	100 %	30.457.672	100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
Fasilitas kunjungan tamu	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan	100 %	-	100 %	-	100 %	5.000.000	100%	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD	

		Kunjungan																
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 %	66.438.000	100 %	99.022.00	100 %	103.973.100	100%	109.171.755	100 %	114.630.343	100 %	120.361.860	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Penatausahaan arsip dinamis	Frekuensi Penataan Arsip Dinamis	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis Elektronik	Frekuensi Pemeliharaan IT	100 %		100 %		100 %	1.000.000	100%	1.100.000	100 %	1.210.000	100 %	1.331.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase Peningkatan Aset Penunjang	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %			

h UPTD Puskesmas	Perkantoran																
Pengadaan kendaraan perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
Pengadaan mebel	Tersedia Mebel Kantor	100%	2.300	100%	5.587.219	100%	6.145.941	100%	6.760.535	100%	7.436.588	100%	8.180.247	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan lainnya	100%	12.680	100%	30.030.608	100%	30.030.608	100%	30.030.608	100%	31.538	100%	31.538	100%	31.538	Pengelola Barang	JKN/BLUD
Pengadaan asset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap	100%	14.030	100%	30.030.608	100%	33.033.669	100%	36.337.036	100%	39.970.739	100%	43.967.813	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
Pengadaan asset tak berwujud	Jumlah Aset Tak	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD

		Berwujud																
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100%	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan	Persentase pelaksanaan tugas	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %			

	pemerintah UPTD Puskesmas	rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu																
	Penyediaan jasa surat menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Tata Usaha	BLUD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Tata Usaha	BLUD

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Frekuensi Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		Tata Usaha	BLUD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Frekuensi Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		Tata Usaha	BLUD
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan UPTD Puskesmas	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD

		pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu																	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan atau Dinas Jabatan yang terpelihara																Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dibayar	3 kendaraan		3 kendaraan		3 kendaraan			4 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan				Pengelola Barang	JKN/BLUD

	l atau lapangan																	
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebelair yang Terpelihara	100 %	-	100 %		100 %	2.000.000	100%	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara	100 %	4.710.000	100 %	6.832.000	100 %	7.173.600	100%	7.532.280	100 %	7.908.894	100 %	8.304.339	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap yang Terpelihara	100 %	600.000	100 %	244000	100 %	3.247.640	100%	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang Terpelihara	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara /terehabilit	100 %	8.910.000	100 %	9.300.000	100 %	9.775.500	100%	10.264.275	100 %	10.777.489	100 %	11.316.363	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang Terpelihara /terehabilitasi	100 %	600.000	100 %	244.000	100 %	3.247.640	100%	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana	Jumlah sarana dan	100 %	600.000	100 %	244.000	100 %	3.247.640	100%	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD

	AN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang														Pengelola Barang	JKN/BLUD

		melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)																	
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang dikembangkan																Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengembangan Fasilitas Kesehatan	100%	-	100%	-	100%	-	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD

		n Lain nya																	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang direhabilitasi	100 %	8.910.000	100 %	9.300.000	100 %	9.775.500	100%	10.264.275	100 %	10.777.489	100 %	11.316.363	100 %	100 %	Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya															Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Ruma															Pengelola Barang	JKN/BLUD	

		h Dinas Tenaga Kesehatan															
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terse di ny a Saran a Fasili tas Felay anan Keseh atan	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	Pengel ola Baran g	JKN/BLU D		
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terse di ny a Prasa rana dan Pend ukung g Fasili tas Pelay anan Keseh	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	Pengel ola Baran g	JKN/BLU D		

		atan																
	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perse ntase Penye diaan Alat Keseh atan /Alat Penu njang Medi k Fasili tas Pelay anan Kesc hata n	100 %	1.02 0.00 0	100 %	98 56 38 9	100 %	11.9 26.2 31	100%	13.11 8.854	100 %	14.4 30.7 39	100 %	15.0 00.0 00	100 %		Pengel ola Baran g	JKN/BLU D
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terse diany a Penga daan dan Pemcl ihara anAla t Kalib rasi	100 %		100 %		100 %	100%		100 %		100 %		100 %			Pengel ola Baran g	JKN/BLU D

	Pengadaan Obat, Vaksin	terpe nuhin ya keter sedia an obat dan Vaksi n	100 %	12.6 21.1 52	100 %	47. 33 7.5 55	100 %	60.1 00.3 70	100%	60.10 0.370	100 %	74.2 99.0 78	100 %	94.6 75.1 10	100 %		Pengel ola Baran g	JKN/BLU D
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terse diany a Baha n Habis Pakai	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengel ola Baran g	JKN/BLU D
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeli hara an Saran a Fasilit as Pelaya nan Keseh atan	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengel ola Baran g	JKN/BLU D
	Pemeliharaan Prasarana dan	Terse diany a	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengel ola Baran g	JKN/BLU D

	Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terseedia Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Pengelola Barang	JKN/BLUD

		k Fasili tas Pelay anan Kese hata n																
	Kegiatan Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Perse ntas e Layan an Kesch atan untuk UKM dan UKP	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %			
	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Ibu Hamil;	Caku pan Ibu Hamil K4	58, 4%		10 0%	30 0.0 00. 00 0	10 0%	315. 000. 000	100 %	330.7 50.00 0	10 0%	347. 287. 500	100 %	364. 651. 875	100 %		Progr am KIA	JKN/BOK
	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;	Caku pan pertol onga n persa linan	100 %		85 %	35 0.0 00. 00 0	90 %	350. 000. 000	100 %	367.5 00.00 0	10 0%	385. 875. 000	100 %	405. 168. 750	100 %		Progr am KIA	JKN

		oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)																
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;	Cakupan kunjungan bayi	100%		95%	331.738.798	100%	348.324.900	100%	365.741.145	100%	384.028.202	100%	403.229.612	100%		Program KIA	JKN/BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;	Cakupan Pelayanan Anak Balita	46,2%		90%	1900.000	100%		100%	100%		100%	100%			Program Gizi	BOK	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Cakupan penjangkaran	93,1%		100%	175.98.61	100%		100%	100%		100%	100%			Program UKS	BOK	

	pada Usia Pendidikan Dasar;	n kesehatan siswa SD dan setingkat				2												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;	Perse ntase Pelay anan Keseh atan pada Usia Produ ktif	93,3		100 %	13 07 92. 30 0	100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Progr am PTM	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;	Cakup an pelaya nan keseh atan dasar terhad ap lanjut usia	58,4 %		10 0%	23 50 00. 00 0	10 0%		100 %		10 0%		100 %		100 %		Progr am Lansia	JKN/BOK

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;	Perseentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52,7 %		100%	205.000,00	100%		100%		100%		100%		Program PTM	JKN/BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;	Perseentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	85,8 %		100%	201.000,00	100%		100%		100%		100%		Program PTM	JKN/BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Perseentase Pelayanan Kesehatan	63,6 %		100%	139.000,00	100%		100%		100%				Program Kesehatan Jiwa	BOK

	Gangguan Jiwa Berat;	n Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB. BTA Positif	77,4 %	10 0%	23 4.0 00. 00 0	10 0%	100 %		10 0%		100 %					Program TB	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;	85,4 %	10 0%	15 0.0 00. 00 0	10 0%	100 %		10 0%		100 %					Program HIV/IMS	BOK

		Risiko Terinfeksi HIV															
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);	Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan			100%		100%		100%		100%		100%		Program Surveilans		BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)			100%		100%		100%		100%		100%		Program Gizi		BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Persepsi desa yang			100%		100%		100%		100%		100%		Program Kesehatan		BOK

	Kerja dan Olahraga;	memunyai pos UKK														Kerja dan Olahraga	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;	Persentase Kelurahan / desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			60 %	70 %	80%		90 %		100 %					Program Kesehatan Lingkungan	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;	Persentase Pelayanan Promosi Kesehatan			100 %	100 %	100 %		100 %		100 %					Program promosi Kesehatan	BOK
	Pengelolaan	Persentase			100 %	100 %	100 %		100 %		100 %					Program	BOK

	n Pelayanan Kesehatan Tradisional , Akupuntur , Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;	Pelay anan Kese hatan Tradi sional Akupu ntur, Asuha n Mandi ri, dan Tradisi onal Lainn ya yang dibina															Keseh atan tradisi onal	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan;	Caku pan Desa /kelu rahan meng alami KLB yang dilak ukan penye lidikk			10 0%		10 0%		100 %		10 0%		100 %		100 %			

		an epide miolo gi <24 jam																
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);	Perse ntase Pelay anan Kese hata n Oran g deng an Masa lah Kese hata n Jiwa (OD MK)			10 0%		10 0%		100 %		10 0%		100 %		100 %		Progr am Kesch atan Jiwa	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;	Perse ntase Pelay anan Kesch atan			10 0%		10 0%		100 %		10 0%		100 %		100 %		Progr am Kesch atan Jiwa	BOK

		Jiwa dan NAPZA															
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;	Perse ntase Penyakit men ular dan Tidak Menu lar yang ditan gani			10 0%	10 0%		100 %		10 0%		100 %		100 %		Progr am Survei lans	BOK
	Pengambil an dan Pengirima n Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratori um Rujukan/ Nasional;	Perse ntase Penga mbil an dan Pengi rima n Spesi men Penya kit Poten sial	100 %		10 0%	10 0%		100 %		10 0%		100 %		100 %		Progr am Survei lans	BOK

		KLke Laboratorium Rujukan/ Nasional																
	Operasional Pelayanan Puskesmas;	Terse dianya Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		PJ UKP	JKN/BLU D
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);	Terse dianya Inves tigasi Awal Kejadian Tidak Dihar apkan (Kejadian	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Progr am imuni sasi	BOK

		Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah; dan	Terse dianya Pelak sana an Kewa spada an Dini dan Respo n Waba h														PJ Survei lans	BOK
	Penyediaa n dan Pengelolaa n Sistem Penangana n Gawat	Terse dianya Penyec diaa n dan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		PJ UKP	JKN/BLU D	

	Darurat Terpadu (SPGDT)	Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)															
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Tata Usaha	JKN/BLUD	
	Pengelolaan Data dan	Terseadinya	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Tata Usaha	JKN/BLUD	

	Informasi Kesehatan	Data dan Informasi Kesehatan																
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															Tata Usaha	JKN/BLUD
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Tata Usaha	JKN/BLUD

		Kesehatan dan Jaringan Internet																
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Tata Usaha	JKN/BLUD	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Persentase Peningkatan														Tata Usaha	JKN/BLUD	

	SUMBER DAYA	Kapasit as Sumber Daya																
	MANUSIA KESEHAT AN	Manusi a Keseha tan																
	Perencana an Kebutuhan dan Pendayagu naan Sumberda ya Manusia Keschatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Persent ase Perenca naan Kebutu han dan Penday agunaa n Sumber daya Manusi a Kescha tan untuk UKP dan UKM di Wilaya h																
	Pemenuha n		85%		90%		95%		100%		100 %		100 %		100 %		Tata Usaha	JKN/BLU D

	Manusia Kesehatan																	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		Tata Usaha	JKN/BLUD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		100 %			

	Lintas Sektor	serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten																
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta (masyarakat) mengikuti KIE keaman pangan	Orang														Program promosi Kesehatan	BOK
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif,	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Program promosi Kesehatan	BOK

	Cakupan peserta KB aktif	jumlah seluruh PUS dalam 1 tahun) x 100%	72%	Rp.8.000.000	72%	Rp.10.744.000	72%	Rp.12.330.000	75%	Rp.12.330.000	PJ KIA	BOK
8	Persentase remaja putri mendapat TTD setiap minggu selama 1 tahun	(Jumlah remaja putri mendapat TTD 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun / jumlah remaja putri umur 12-18 tahun) x 100%	44,9%	Rp.0	5%	Rp.3.600.000	5%	Rp.3.600.000	5%	Rp.3.600.000	PJ GIZI	BOK
9	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD	(jumlah bayi baru lahir mendapat IMD / jumlah seluruh bayi baru lahir) x 100%	6,53%	Rp.0	50%	Rp.0	50%	Rp.0	50%	Rp.0	PJ GIZI	BOK
10	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani / jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada) x 100%	85%	Rp.3.975.000	88%	Rp.3.975.000	90%	Rp.3.975.000	90%	Rp.4.500.000	PJ KIA	BOK
11	Cakupan pelayanan kesehatan	(Jumlah anak yang memperoleh pelayanan pemantauan 8 kali / jumlah seluruh	6,53%	Rp.113.250.000	83%	109.150.000	84%	Rp.113.250.000	85%	115.000.000	PJ KIA	BOK

	n balita (0-59 bulan) sesuai standar	anak balita dalam 1 tahun) x 100%										
12	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	(Jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan / jumlah balita gizi buruk yang ditemukan) x 100%	100%	Rp.21.600.000	100%	Rp.21.600.000	100%	Rp.27.000.000	100%	Rp.31.050.000	PJ GIZI	BOK
13	Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	(jumlah balita 6.11 bulan dan balita 12-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A / jumlah balita 6-59 bulan) x 100%	100%	Rp.3.300.000	96%	Rp.3.300.000	97%	Rp.3.300.000	97%	Rp.3.300.000	PJ GIZI	BOK
14	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD, SMP,	(Jumlah siswa kelas 1 SD, SMP, SMA sederajat pada tahun yang sama) x 100%	46%	Rp.8.300.000	100%	Rp.8.300.000	100%	Rp.8.300.000	100%	Rp.8.300.000	PJ UKS	BOK

	SMA sederajat											
15	Persentase kader UKS	(Jumlah kader UKS / jumlah seluruh siswa) x 100%	9,90%	Rp.2.420.000	10%	Rp.2.420.000	10%	Rp.2.420.000	10%	Rp.2.420.000	PJ UKS	BOK
16	Persentase jumlah posyandu lansia PURI	(Jumlah posyandu lansia PURI / jumlah seluruh posyandu lansia) x 100%	62,9%	Rp.68.235.000	25%	Rp.89.827.000	30%	Rp.59.830.000	35%	Rp.69.185.000	PJ LANSIA	BOK
17	Peningkatan Posyandu PURI	(Jumlah posyandu PURI / jumlah seluruh posyandu) x 100%	100%	Rp.4.530.000	92%	Rp.2.225.000	93%	Rp.2.225.000	94%	Rp.2.225.000	PJ PROMKES	BOK
18	Pelaksanaan MMD di desa	(Jumlah desa yang melaksanakan MMD / jumlah seluruh desa di wilayah kerja) x 100%	40%	Rp.0	100%	Rp.1.287.000	100%	23.612.000	100%	Rp.23.312.000	PJ PROMKES	BOK
19	Peningkatan jumlah Poskesdes PURI	(Jumlah Poskesdes PURI / jumlah seluruh Poskesdes) x 100%	100%	Rp.0	53%	Rp.2.050.000	54%	Rp.2.050.000	55%	Rp.2.050.000	PJ PROMKES	BOK
20	Peningkatan	(Jumlah Poskestren PURI / jumlah seluruh)	100%	Rp.3.400.000	33%		34%	Rp.825.000	35%			BOK

	pembentukan Poskestren	Poskeskestren) x 100%								Rp.825.000	PJ PROMKES	
21	Persentase desa ODF	(Jumlah desa ODF / jumlah seluruh desa diwilayah kerja) x 100%	59%	Rp.49.250.000	100%	Rp.10.900.000	100%	Rp.6.265.000	100%	Rp.3.600.000	PJ KESLING	BOK
22	Persentase rumah tangga yang melaksanakan CTPS	(Jumlah rumah tangga yang melaksanakan CTPS/ jumlah seluruh rumah tangga di wilayah kerja) x 100%	94,88%	Rp.46.350.000	30%	Rp.9.595.000	35%	Rp.0	40%	Rp.3.000.000	PJ KESLING	BOK
23	Persentase SAB memenuhi syarat kesehatan	(Jumlah SAB yang memenuhi syarat kesehatan / jumlah seluruh SAB di wilayah kerja) x 100%	100%	Rp.200.000	79%	Rp.1.425.000	80%	Rp.300.000	81%	Rp.300.000	PJ KESLING	BOK
24	Persentase rumah tangga yang melaksanakan	(Jumlah rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah/ jumlah seluruh rumah tangga diwilayah kerja) x 100%	74,12%	Rp.0	79%	Rp.0	80%	Rp.0	81%	3.450.000	PJ KESLING	BOK

	pendidikan	/ jumlah seluruh institusi pendidikan di wilayah kerja) x 100%	100%	Rp.1.000.000	58%	Rp.1.650.000	60%	Rp.1.100.000	62%	Rp.1.100.000	PJ PROMKES	BOK
28	Cakupan PHBS di institusi kesehatan	(Jumlah kegiatan penyuluhan atau intervensi di institusi kesehatan / jumlah seluruh institusi kesehatan di wilayah kerja) x 100%	100%	Rp.1.000.000	88%	Rp.1.650.000	90%	Rp.1.100.000	92%	Rp.1.100.000	PJ PROMKES	BOK
29	Cakupan PHBS di institusi tempat kerja	(Jumlah kegiatan penyuluhan atau intervensi di tempat kerja / jumlah seluruh institusi pendidikan di wilayah kerja) x 100%	100%	Rp.1.000.000	56%	Rp.1.650.000	58%	Rp.550.000	60%	Rp.550.000	PJ PROMKES	BOK
30	Cakupan PHBS di TTU	(Jumlah kegiatan penyuluhan atau intervensi di TTU / jumlah seluruh TTU di wilayah kerja) x 100%	100%	Rp.1.000.000	68%	Rp.1.650.000	70%	Rp.550.000	72%	Rp.550.000	PJ PROMKES	BOK
31	Cakupan PHBS di pesantren	(Jumlah kegiatan penyuluhan atau intervensi di pesantren / jumlah seluruh pesantren	100%	Rp.1.000.000	38%	Rp.1.650.000	40%	Rp.550.000	42%	Rp.550.000	PJ PROMKES	BOK

		di wilayah kerja) x 100%										
32	Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi campak	(jumlah bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi campak / jumlah sasaran bayi usia 0-11 bulan) x 100%	100%	Rp.38.920.000	93%	Rp.84.981.000	94%	Rp.101.124.600	95%	Rp.113.054.500	PJ IMUNISASI	BOK
33	Persentase terlaksananya penanggulangan krisis kesehatan dan bencana di wilayah kondisi matra	(Jumlah krisis kesehatan dan bencana yang ditanggulangi / jumlah seluruh krisis kesehatan dan bencana di wilayah kondisi matra) x 100%	100%	Rp.0	86%	Rp.7.080.000	88%	Rp.7.080.000	90%	Rp.7.080.000	PJ SURVELANS	BOK
34	Persentase pembinaan kesehatan	(jumlah jamaah haji dibina / jumlah seluruh jamaah haji) x 100%	90%	Rp.8.000.000	85%	Rp.11.300.000	88%	Rp.11.300.000	90%	Rp.11.300.000	PJ SURVELANS	BOK

	Cakupan pelayanan DM	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun) x 100%	98%	Rp. 14.558.000	15%	Rp.15.290.000	20%	Rp.23.225.000	20%	Rp.42.515.000	PJ PTM	BOK
46	Monitoring / inspeksi jasa boga / katering	(Jumlah TPM jasa boga yang dilakukan IKL / jumlah seluruh TPM jasa boga diwilayah kerja) x 100%	100%	Rp.0	60%	Rp.0	60%	Rp.0	60%	Rp.0	PJ KESLING	BOK
47	Monitoring / inspeksi rumah makan/restaurant	(Jumlah TPM rumah makan yang dilakukan IKL / jumlah seluruh TPM rumah makan diwilayah kerja) x 100%	75%	Rp.0	60%	Rp.1.680.000	60%	Rp.1.680.000	60%	Rp.1.680.000	PJ KESLING	BOK
48	Monitoring / inspeksi DAM	(Jumlah inspeksi DAM yang dilakukan IKL / jumlah seluruh DAM diwilayah kerja) x 100%	100%	Rp.1.725.000	60%	Rp.1.725.000	60%		60%	Rp.1.725.000	PJ KESLING	BOK

49	Monitoring / inspeksi kantin/sentra makanan jajan	(Jumlah TPM jajanan yang dilakukan IKL / jumlah seluruh TPM jajanan di wilayah kerja) x 100%	85,71%	Rp.0	60%	Rp.425.000	60%	Rp.2.935.000	60%	Rp.2.935.000	PJ KESLING	BOK
50	Pembinaan RS, Klinik, DPM dan BPM jejaring Puskesmas	(Jumlah klinik, DPS dan BPS yang dibina / jumlah klinik, DPS dan BPS yang ada) x 100%	95%	Rp.8.700.000	100%	Rp.9.135.000	100%	Rp.9.591.750	100%	Rp.10.071.337	PJ JARINGAN DAN JEJARING	BOK
51	Pendataan tenaga kesehatan di wilayah kerja	Pendataan tenaga kesehatan di wilayah kerja 1 tahun sekali	100%	Rp.1.450.000	100%	Rp.1.522.500	100%	Rp.1.522.500	100%	Rp.1.598.625	PJ JARINGAN DAN JEJARING	BOK
52	Pembinaan sarana Kefarmasian	(Jumlah sarana kefarmasian apotek dan toko obat yang berijin / jumlah seluruh sarana kefarmasian apotek dan toko obat	100%	Rp.200.000	100%	Rp.210.000	100%	Rp.220.500	100%	Rp.231.525	PJ JARINGAN DAN	BOK

	dan non subsidi	jaminan kesehatan yang terlayani / jumlah seluruh masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan berkunjung di Puskesmas] x 100%	\ 10%	Rp.46.800.000	100%	Rp.49.140.000	100%	Rp.51.597.000	100%	Rp.51.176.850	PJ UKP	BLUD PUSKESMAS
55	Pelayanan 24 jam	Terlaksananya pelayanan gawat darurat 24 jam di Puskesmas	100%	Rp.72.000.000	100%	Rp.75.600.000	100%	Rp.79.380.000	100%	Rp.83.349.000	PJ UKP	BLUD PUSKESMAS
56	Kejelasan informasi jenis pelayanan dan tarif pelayanan	Terpasangnya informasi jenis pelayanan dan tarif pelayanan sesuai Perbup	100%	Rp.16.000.000	100%	Rp.16.800.000	100%	Rp.17.640.000	100%	Rp.18.522.000	PJ UKP	BLUD PUSKESMAS

Puskesmas di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen Puskesmas yang berkualitas.

Besar harapan untuk periode lima tahun ke depan, seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama menuju terwujudnya Kabupaten Konawe Selatan yang mandiri dalam bidang kesehatan sesuai visi Kabupaten Konawe selatan yaitu Kabupaten Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan Tahun 2026.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	f
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	l
4. KABAG HUKUM	h
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA